



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

2023



BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) BBP3KP Triwulan I Tahun 2023 ini dapat selesai tepat pada waktunya. Tujuan dari penyusunan LKj Tahun 2023 ini adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja BBP3KP kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas. Selain itu, penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal BBP3KP.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tim Inspektorat Jenderal KKP, Biro Perencanaan Setjen KKP dan Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP yang telah membimbing penyusunan LKj serta kepada tim pelaksana kegiatan dan segenap keluarga besar BBP3KP yang telah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh kegiatan di lingkungan BBP3KP dengan penuh tanggung jawab.

Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan BBP3KP di waktu yang akan datang. Saran dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya.

Jakarta, 18 April 2023
Kepala BBP3KP



Dr. Trisna Ningsih, A.Pi, S.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. TUGAS DAN FUNGSI	2
1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
1.5. PERMASALAHAN UTAMA	4
1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1. RENCANA STRATEGIS	8
2.2. PENETAPAN KINERJA BBP3KP TAHUN 2023	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. CAPAIAN KINERJA	13
3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	16
IK 1. Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing (%)	17
IK 2. Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan (Produk)	19
IK 3. Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)	21
IK 4. Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)	24
IK 5. Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (UMKM)	28
IK 6. Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	31
IK 7. Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	35
IK 8. Nilai PNBP di lingkungan BBP3KP (Rp Miliar)	37
IK 9. Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	38
IK 10. Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP (Nilai)	39

IK 11. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	42
IK 12. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)	44
IK 13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP (Nilai)	46
IK 14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP (%)	48
IK 15. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP (%) ..	49
IK 16. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP (Inovasi) .	51
IK 17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	52
IK 18. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	55
IK 19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP (%).....	57
IK 20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%) ...	58
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	59
3.3.1. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2023.....	59
BAB IV PENUTUP	61
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut	61

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BBP3KP Tahun 2023.....	10
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja BBP3KP Triwulan I Tahun 2023	13
Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing.....	18
Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan	21
Tabel 5. Rekapitulasi Penyebarluasan Informasi Hasil Uji Terap dan Pengujian Hasil Perikanan pada Triwulan I.....	22
Tabel 6. Pencapaian Indikator Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang).....	24
Tabel 7. Hasil Seleksi Tenant Inbis Invapro-KP BBP3KP tahun 2023	27
Tabel 8. Pencapaian Indikator Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)	28
Tabel 9. Pencapaian Indikator Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan	31
Tabel 10. Pencapaian Indikator Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan.....	34
Tabel 11. Pencapaian Indikator Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan	36
Tabel 12. Pencapaian Indikator Nilai PNBK di lingkungan BBP3KP	38
Tabel 13. Pencapaian Indikator Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	39
Tabel 14. Pencapaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP	41
Tabel 15. Pencapaian Indikator Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP	43
Tabel 16. Pencapaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP	46
Tabel 17. Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP	48
Tabel 18. Pencapaian Indikator Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP.....	49
Tabel 19. Pencapaian Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP	50
Tabel 20. Pencapaian Indikator Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP	52

Tabel 21. Pencapaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP	55
Tabel 22. Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP.....	57
Tabel 23. Pencapaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP	58
Tabel 24. Pencapaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)	59
Tabel 25. Realisasi Anggaran BBP3KP per Output Kegiatan	60

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi BBP3KP	3
Gambar 2. Pegawai BBP3KP per Akhir Maret Tahun 2023.....	4
Gambar 3. NPSS BBP3KP pada Aplikasi SAPK Triwulan I Tahun 2023	13
Gambar 4. Kegiatan BBP3KP dalam pencapaian target indikator kinerja Bahan RSNI hasil KP pada Triwulan I.....	20
Gambar 5. Kegiatan diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan.....	22
Gambar 6. Rekapitulasi Pengunjung pada Sosial Media BBP3KP	23
Gambar 7. Rapat persiapan kegiatan pendampingan tenant Inbis Invapro KP.....	26
Gambar 8. Pendampingan tenant Inkubasi Bisnis Invapro KP	27
Gambar 9. Sertifikasi Keanggotaan AIBI	28
Gambar 10. Peningkatan kompetensi SDM	30
Gambar 11. Kunjungan PT. FITS Mandiri dan Koordinasi awal dengan UMKM dan perwakilan Dinas KP	30
Gambar 12. Kegiatan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan	33
Gambar 13. Peta Sebaran Lokasi Penilaian Kesesuaian Produk Kelautan dan Perikanan terhadap SNI	34
Gambar 14. Kegiatan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan	36
Gambar 15. Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Arsip	41
Gambar 16. Kegiatan persiapan dan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.....	43
Gambar 17. Komponen Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP	45
Gambar 18. Kegiatan peningkatan profesionalitas ASN BBP3KP	46
Gambar 19. Kegiatan dialog kinerja organisasi dan penyusunan dokumen PK.....	47
Gambar 20. Tangkapan Layar Aplikasi SIDAK Triwulan I Tahun 2023.....	50
Gambar 21. Koordinasi Penerapan QR-code dan Barcode pada layanan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI dengan Pusdatin	52
Gambar 22. Reformulasi IKPA 2023	53
Gambar 23. Kegiatan BMN Triwulan I Tahun 2023	59

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Triwulan I Tahun 2023 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) BBP3KP selama Triwulan I Tahun 2023, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP dan Rencana Strategis BBP3KP Tahun 2020-2024.

Kontrak kinerja antara Kepala BBP3KP dengan Direktur Jenderal PDSPKP yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2023 terdiri atas 8 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja BBP3KP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dari 20 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 2 indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dihitung per triwulan yaitu: (1) Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan, dan (2) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP;
2. Terdapat 2 indikator kinerja yang pencapaiannya dapat dihitung secara semesteran yaitu: (1) Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP; dan (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP. Selain itu terdapat 16 indikator kinerja yang pencapaiannya baru dapat dihitung pada akhir tahun, yaitu: (1) Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing; (2) Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan; (3) Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis; (4) Pelaku usaha yang difasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan; (5) Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan; (6) Nilai PNBPN di lingkungan BBP3KP; (7) Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan; (8) Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan; (9) Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP; (10) Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); (11) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP; (12) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP; (13) Unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik di lingkungan BBP3KP; (14) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan

BBP3KP; (15) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP; dan (16) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP.

Secara umum, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Perlu adanya monitoring dan evaluasi mengenai kebermanfaatan hasil-hasil kegiatan BBP3KP di masyarakat;
2. Perlu untuk meningkatkan koordinasi internal dan eksternal terkait integrasi pelaksanaan program dan kegiatan agar terarah dan bersinergi, dalam lingkup BBP3KP, Ditjen PDSPKP, KKP, dan dengan pemerintah daerah; dan
3. Perlu adanya percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing indikator kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada *outcome*. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas disini diartikan sebagai perwujudan dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Tahapan penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Penyusunan Rencana Strategis, (2) Perjanjian Kinerja, (3) Pengukuran Kinerja, (4) Pengelolaan Kinerja, (5) Pelaporan Kinerja dan (6) Review dan Evaluasi Kinerja.

Pelaporan Kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) menyusun Laporan Kinerja BBP3KP Triwulan I Tahun 2023. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2023.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BBP3KP Triwulan I Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas kinerja yang telah dicapai oleh Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan selama Triwulan I tahun 2023.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal BBP3KP.

1.3. TUGAS DAN FUNGSI

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Keberadaan BBP3KP didasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan.

BBP3KP memiliki tugas pokok melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

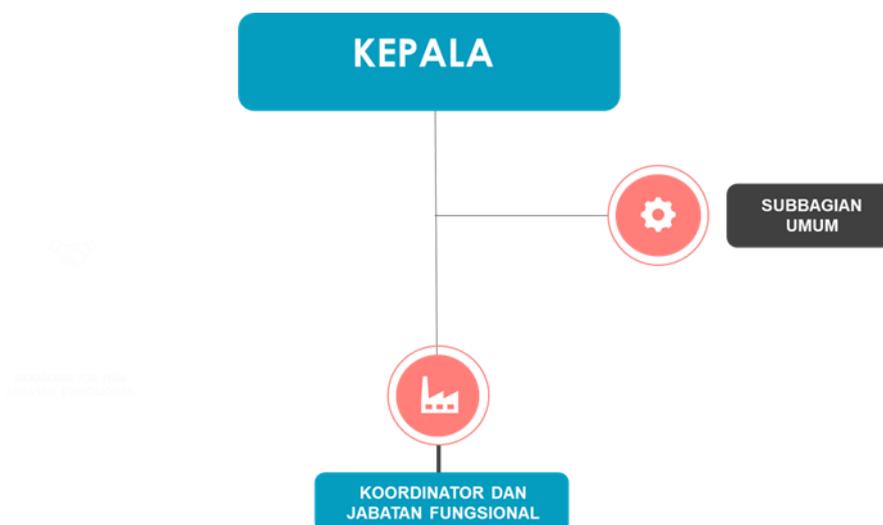
- a) Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- b) Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c) Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganeekaragaman produk hasil perikanan;
- d) Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- e) Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia hasil perikanan;
- f) Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g) Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk hasil perikanan;
- h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BBP3KP mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Subbag Umum; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas tersebut, organisasi BBP3KP diatur seperti pada Gambar 1.

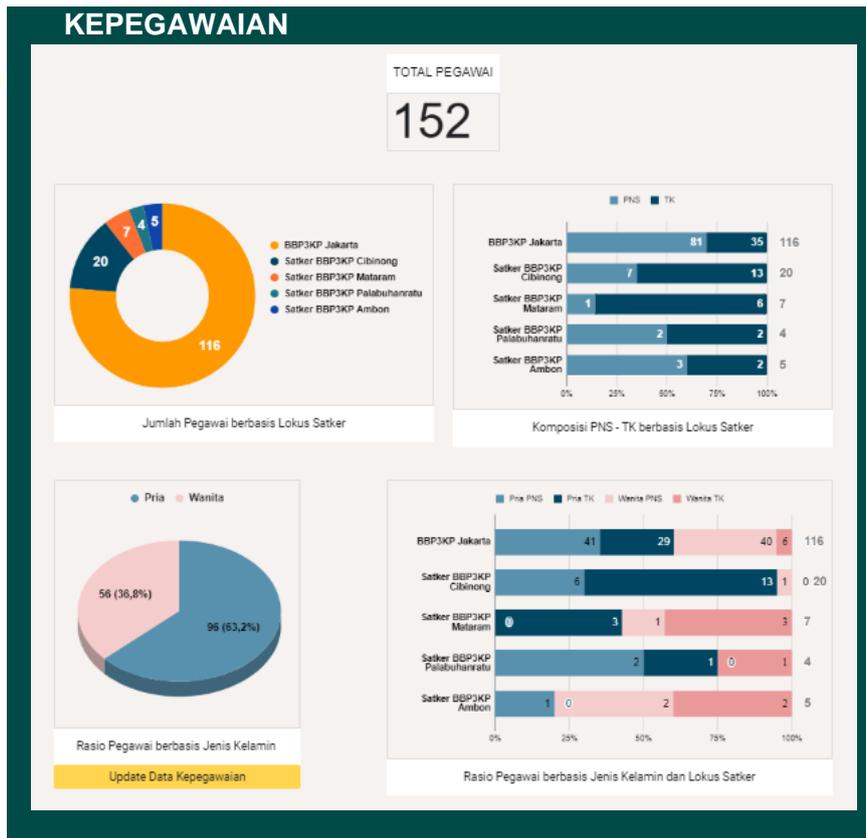


Gambar 1. Struktur Organisasi BBP3KP

Berdasarkan Permen KP No. 68 Tahun 2020, pada BBP3KP dibentuk 4 satuan kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja, yang berlokasi di Cibinong, Palabuhanratu, Mataram, dan Ambon. Keempat satuan kerja tersebut merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pelayanan pengembangan usaha produk kelautan dan perikanan, yang dipimpin oleh pengelola satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

1.4. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2023, jumlah pegawai BBP3KP per akhir Maret Tahun 2023 adalah sebanyak 152 orang, dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Pegawai BBP3KP per Akhir Maret Tahun 2023

1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Beberapa faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan diantaranya: (a) Kapabilitas pelaku usaha pengolahan dan pemasaran, (b) Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI), (c) Mutu produk kelautan dan perikanan, (d) Susut hasil dan pemanfaatan hasil samping dalam penanganan dan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, (e) Ketahanan pangan, (f) Ancaman *stunting*, (g) Peluang pemanfaatan inovasi *Blue Economy*, (h) Perkembangan teknologi, (i) Mikroplastik (produk dan kemasan), dan (j) Perubahan iklim dunia.

Kapabilitas pelaku UMKM pengolahan dan pemasaran, sebagian besar belum dapat mencapai skala ekonomis. Volume produk olahan yang diperjualbelikan per satuan waktu tidak begitu banyak, sementara pengerjaannya sering menghabiskan waktu seharian dan melibatkan beberapa orang. Kondisi ini adalah *unsteady-state* bisnis, di mana tidak terjadi perimbangan yang layak pada *benefit-cost* dan *net present value* usaha.

Dari sisi mutu, produk kelautan dan perikanan dihadapkan pada tantangan pemenuhan perubahan standar mutu pangan yang berlaku di pasar. Untuk mempertahankan posisi tawar dan menjamin penerimaan produk kelautan dan perikanan

di pasaran, maka setiap standar yang berlaku harus dipenuhi. Keterampilan penanganan mutu dan keunikan cita rasa produk Indonesia dengan dukungan pembinaan mutu intensif dari pemerintah diyakini dapat menjawab tantangan standar mutu tersebut. Pembinaan penerapan standar dan sertifikasi mutu dinilai strategis membantu pembenahan internal yang dihadapi pelaku usaha.

Isu mikroplastik pada produk maupun kemasan akan berpengaruh penting dalam pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan. Kontaminasi monomer dari kemasan berbahan plastik dapat membahayakan kesehatan, sehingga diperlukan teknologi yang menggantikan kemasan yang berbahan baku plastik.

Pengaruh teknologi cenderung positif karena mengintroduksi konsep Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital. Penyediaan bahan baku, proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk secara digital dapat mempercepat pertumbuhan usaha perikanan. Muatan digitalisasi usaha, perizinan/sertifikasi *online*, pembinaan dan diseminasi secara *online* akan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ke depan.

Beberapa faktor internal yang berpengaruh diantaranya adalah (a) Ketersediaan anggaran, (b) Sumber Daya Manusia, dan (c) Keragaman kebutuhan para penerima manfaat dari kegiatan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.

Anggaran merupakan prasyarat dasar pelaksanaan kegiatan. Peningkatan layanan pengujian membutuhkan peralatan yang beroperasi dengan baik dan memberikan hasil yang cepat serta akurat. Anggaran untuk kegiatan kalibrasi maupun perbaikan peralatan yang rusak perlu dipastikan ketersediaan dan kecukupannya. Anggaran yang memadai juga dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana kegiatan diseminasi dan *upgrading* perangkat lunak untuk penyusunan media informasi.

Dalam hal SDM, pemeliharaan dan peningkatan kompetensi SDM eksisting membutuhkan perhatian untuk memastikan kegiatan dapat berjalan dengan optimal. Mengikuti perkembangan teknologi, dibutuhkan lebih banyak SDM yang dapat memanfaatkan peralatan berbasis teknologi informasi. Penyiapan generasi pengganti melalui rekrutmen pegawai baru yang berkompeten juga merupakan keharusan karena sebagian SDM yang saat ini aktif akan memasuki usia purnabakti dalam beberapa tahun ke depan.

Penerima manfaat dari kegiatan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu penerap inovasi, klien LSPPro-HP, dan tenant Inkubator Bisnis Inovasi Produk. Setiap kelompok memiliki keragaman tinggi dalam hal kebutuhan dan harapan akan bantuan dan bimbingan yang

diberikan. Kemampuan mengidentifikasi masalah serta solusi yang dapat ditawarkan kepada masing-masing penerima manfaat dari kegiatan adalah tantangan bagi BBP3KP untuk terus dapat meningkatkan kebermanfaatannya bagi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Sehubungan dengan berbagai isu strategis tersebut, BBP3KP menetapkan sasaran dan indikator kinerja seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Dirjen PDSPKP dan Kepala BBP3KP.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja BBP3KP Triwulan I Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja BBP3KP selama Triwulan I tahun 2023. Capaian Kinerja (*Performance Results*) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LKj BBP3KP

mengacu pada
Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun
2014

Bab I Pendahuluan, Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada isu strategis yang sedang dihadapi oleh organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja BBP3KP Triwulan I Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja BBP3KP Triwulan I Tahun 2022 dan analisisnya.

Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja BBP3KP serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran, menyajikan Perjanjian Kinerja dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan merumuskan tujuan pembangunan selama lima tahun, sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaku usaha kelautan dan perikanan yang inovatif dan berdaya saing. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan penerap inovasi yang berdaya saing, dari 60% pada tahun 2020 menjadi 70% pada tahun 2024.
2. Meningkatnya produk kelautan dan perikanan berdaya saing untuk konsumsi masyarakat. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan jumlah produk kelautan dan perikanan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat, dari 30 produk pada tahun 2020 menjadi 50 produk pada tahun 2024.
3. Meningkatnya nilai LKE Pembangunan ZI menuju WBK BBP3KP. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai LKE Pembangunan ZI menuju WBK BBP3KP, dari 75 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024, atau dengan kata lain, perolehan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada tahun 2024.
4. Meningkatnya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBP3KP. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan peningkatan nilai IKPA BBP3KP, dari 88 pada tahun 2020 menjadi 92 pada tahun 2024.

2.1.1 SASARAN STRATEGIS

Sasaran kegiatan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BBP3KP sebagai suatu *outcome/impact* dari pelaksanaan kegiatan dalam program nilai tambah dan daya saing industri serta program dukungan manajemen di Ditjen PDSPKP. Adapun sasaran tersebut adalah:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - a. Sasaran: Pelaku usaha kelautan dan perikanan inovatif dan berdaya saing. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah persentase

pelaku usaha kelautan dan perikanan penerap inovasi yang berdaya saing meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 70% pada tahun 2024.

- b. Sasaran: Produk kelautan dan perikanan berdaya saing untuk konsumsi masyarakat. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah produk kelautan dan perikanan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat meningkat dari 30 produk pada tahun 2020 menjadi 50 produk pada tahun 2024.

2. Program Dukungan Manajemen

Sasaran: Tata kelola pemerintahan yang baik lingkungan BBP3KP. Indikator kinerja untuk mengukur capaian sasaran strategis ini adalah:

- a. Indeks profesionalitas ASN BBP3KP, meningkat dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024;
- b. Persentase unit kerja BBP3KP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, meningkat dari 82% pada tahun 2020 menjadi 86% pada tahun 2024;
- c. Nilai rekonsiliasi kinerja BBP3KP, meningkat dari 85 pada tahun 2020 menjadi 89 pada tahun 2024;
- d. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BBP3KP, meningkat dari 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024;
- e. Nilai WBK BBP3KP, meningkat dari 75 pada tahun 2020 menjadi 85 pada tahun 2024;
- f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBP3KP, meningkat dari Baik (88) pada tahun 2020 menjadi Baik (92) pada tahun 2024.

2.1.2 Kebijakan

Dalam rangka mendukung dua dari enam arah kebijakan Ditjen PDSPKP, yaitu meningkatkan produk olahan kelautan dan perikanan yang bermutu, aman dan berdaya saing dan meningkatkan konsumsi ikan, BBP3KP menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan teknologi inovasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
2. Meningkatkan penyediaan Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk kelautan dan perikanan;

3. Meningkatkan pelayanan pengujian dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
4. Meningkatkan penyebaran informasi dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan 4 (empat) arah kebijakan di atas, BBP3KP menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh level unit kerja. Di samping itu, BBP3KP melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan transformasi digital.

2.2. PENETAPAN KINERJA BBP3KP TAHUN 2023

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator. Sejak tahun 2013, penetapan kinerja pada unit kerja lingkup BBP3KP telah didasarkan pada konsep manajemen kinerja berbasis BSC.

Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama serta indikator kinerja kegiatan yang diharapkan dicapai oleh BBP3KP pada Triwulan I Tahun 2023 seperti tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja BBP3KP pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BBP3KP Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGUJIAN PENERAPAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Inovatif dan Berdaya Saing	1 Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing (%)	67,5
2	Tersedianya Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	2 Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan (Produk)	3
3	Terselenggaranya Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	3 Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)	1000
4	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	4 Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)	50

	Melalui Inkubasi Bisnis dan Pendampingan Teknologi	5	Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (UMKM)	40
5	Terlaksananya Layanan Sertifikasi dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan	6	Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1
		7	Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1
6	Nilai PNBPN Sektor KP di lingkungan Ditjen PDSPKP	8	Nilai PNBPN di lingkungan BBP3KP (Rp Miliar)	0.585
7	Tenaga Kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	9	Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	450

KEGIATAN 2. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP

DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

8	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan BBP3KP	10	Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP (Nilai)	75
		11	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	75
		12	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)	82.9
		13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP (Nilai)	80.5
		14	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP (%)	≤0.5
		15	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP (%)	75
		16	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP (Inovasi)	1
		17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	89
		18	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	86
		19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP (%)	77.5
		20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)	77.5

BBP3KP mempunyai output kegiatan sesuai dokumen Rencana Kerja TA 2022 pada aplikasi Krisna (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) Bappenas sebagai berikut:

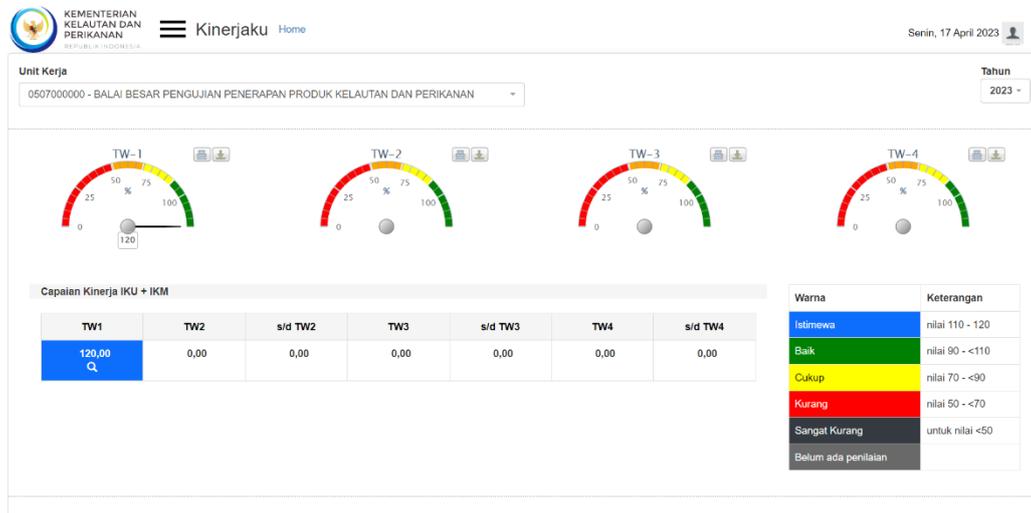
- 1) UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis, sebanyak 50 UMKM;
- 2) UMKM yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP, sebanyak 40 UMKM;
- 3) Orang yang Menerima Diseminasi Diversifikasi Produk KP, sebanyak 1.000 orang;
- 4) Layanan Sertifikasi Produk, sebanyak 1 layanan;
- 5) Layanan Pengujian Produk, sebanyak 1 layanan;
- 6) Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP, sebanyak 3 produk;
- 7) Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BBP3KP yang disediakan, sebanyak 10 unit;
- 8) Layanan Umum, sebanyak 1 layanan;
- 9) Layanan Perencanaan dan Penganggaran, sebanyak 1 layanan;
- 10) Layanan Pemantauan dan Evaluasi, sebanyak 1 layanan;
- 11) Layanan Manajemen Keuangan, sebanyak 1 layanan;
- 12) Layanan Sarana Internal, sebanyak 151 unit; dan
- 13) Layanan Perkantoran, sebanyak 1 layanan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan kegiatan BBP3KP dari bulan Januari sampai dengan Maret 2023. BBP3KP telah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Nilai rata-rata dari Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBP3KP sebesar 120% dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. NPSS BBP3KP pada Aplikasi SAPK Triwulan I Tahun 2023

Rata-rata NPSS diperoleh dari akumulasi penghitungan capaian seluruh Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala BBP3KP dengan Direktur Jenderal PDSPKP. Capaian masing-masing Indikator Kinerja pembentuk NPSS diuraikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja BBP3KP Triwulan I Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI	%TERHADAP TARGET		%DALAM APLIKASI SAPK
			TAHUN 2023	TW I 2023		TAHUN 2023	TW I 2023	
1	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Inovatif dan Berdaya Saing	1	Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing (%)	67.5	0	0	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET		REALISASI	%TERHADAP TARGET		%DALAM APLIKASI SAPK
				TAHUN 2023	TW I 2023		TAHUN 2023	TW I 2023	
2	Tersedianya Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	2	Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan (Produk)	3	0	0	-	-	-
3	Terselenggaranya Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	3	Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)	1.000	100	205	20,5	205	120
4	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Inkubasi Bisnis dan Pendampingan Teknologi	4	Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)	50	0	0	0	-	-
		5	Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (UMKM)	40	0	0	0	-	-
5	Terlaksananya Layanan Sertifikasi dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan	6	Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1	0	0	0	-	-
		7	Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1	0	0	0	-	-
6	Nilai PNPB Sektor KP di lingkungan Ditjen PDSPKP	8	Nilai PNPB di lingkungan BBP3KP (Rp Miliar)	0.585	0	0	0	-	-
7	Tenaga Kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	9	Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	450	0	0	0	-	-
8	Terlaksananya Layanan	10	Nilai Pengawasan	75	0	0	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET		REALISASI	%TERHADAP TARGET		%DALAM APLIKASI SAPK
				TAHUN 2023	TW I 2023		TAHUN 2023	TW I 2023	
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan BBP3KP		Kearsipan di lingkungan BBP3KP (Nilai)						
11		Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	75	0	0	-	-	-	
12		Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)	82.9	0	0	-	-	-	
13		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP (Nilai)	80.5	0	0	-	-	-	
14		Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP (%)	≤0.5	0	0	-	-	-	
15		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP (%)	75	75	100	133,33	133,33	120	
16		Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP (Inovasi)	1	0	0	-	-	-	
17		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	89	0	0	-	-	-	
18		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	86	0	0	-	-	-	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI	%TERHADAP TARGET		%DALAM APLIKASI SAPK
			TAHUN 2023	TW I 2023		TAHUN 2023	TW I 2023	
		19 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP (%)	77.5	0	0	-	-	-
		20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)	77.5	0	0	-	-	-

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja BBP3KP pada setiap Sasaran Kegiatan dilakukan untuk menjelaskan realisasi indikator kinerja utama, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan BBP3KP. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan. Upaya tersebut tercermin dari kegiatan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, penyusunan bahan RSNI, pengujian dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan, serta pelayanan pengembangan usaha. Tahun 2023, BBP3KP mempunyai 20 indikator kinerja yaitu (1) Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing, (2) Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan, (3) Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan, (4) Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis, (5) Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan, (6) Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan, (7) Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan, (8) Nilai PNBPN di lingkungan BBP3KP, (9) Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan, (10) Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP, (11) Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP, (12) Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP, (13) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP, (14) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP, (15) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP, (16) Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP, (17) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan

BBP3KP, (18) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP, (19) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP, dan (20) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP. Analisis untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

KEGIATAN 1. PENGUJIAN PENERAPAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.2.1

Sasaran Kegiatan 1 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Inovatif dan Berdaya Saing

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Inovatif dan Berdaya Saing terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja.

IK 1. Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing (%)

Pelaku usaha kelautan dan perikanan penerap inovasi yang berdaya saing adalah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang difasilitasi oleh BBP3KP dalam kegiatan inkubasi bisnis; pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran; serta pelayanan sertifikasi produk yang memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. Indikator keberhasilan pelaku usaha yang inovatif jika memenuhi kriteria diantaranya (a) memiliki nilai tambah melalui ragam diversifikasi produk, (b) memiliki kemasan sesuai persyaratan, (c) terpenuhinya perbaikan dalam proses produksi dan mutu produk, (d) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, dan (e) menerapkan syarat mutu penanganan sesuai SNI untuk produk ikan hias. Indikator keberhasilan pelaku usaha yang berdaya saing jika memenuhi kriteria diantaranya (a) memperoleh sertifikat kesesuaian SNI, (b) memiliki identitas atau merek yang terdaftar, (c) menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, dibuktikan dengan hasil uji, sertifikat seperti Halal, GMP-SSOP, HACCP, MD, maupun SPPT SNI, (d) memiliki perizinan berusaha seperti NIB, P-IRT, (e) meningkatnya keberterimaan pasar, (f) memiliki wilayah pasar dan jangkauan pemasaran yang luas, (g) aktif berpartisipasi dalam pengembangan usaha perikanan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja ini secara detail dijelaskan pada indikator kinerja inkubasi bisnis, pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran, dan pelayanan sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan. Penghitungan persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang inovatif dan berdaya saing (%PIDS) sebagai berikut:

$$\% \text{ PIDS} = [(A1/A2) \times 30\%] + (B1/B2) \times 30\% + (C1/C2) \times 40\%$$

Keterangan masing-masing kode pada penghitungan diatas yaitu A1 (Jumlah pelaku usaha yang memenuhi indikator keberhasilan dengan nilai minimal 81 (berhasil dengan baik), A2 (Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Inbis Invapro KP), B1 (Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran yang memenuhi indikator keberhasilan yang dipersyaratkan (≥ 75), B2 (Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi teknik pengolahan dan pemasaran), C1 (Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat kesesuaian SNI) dan C2 (Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan sertifikasi).

Tabel 3. Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing (%)	67,5	70	0	0	0	0	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Penghitungan %PIDS tidak terdapat pada dokumen PK BBP3KP tahun 2022, namun tetap dilakukan penghitungan dengan nilai 71,58% dari target jangka menengah sebesar 65%. Untuk tahun 2021, nilai capaian indikator kinerja %PIDS yaitu 68,26% dari target 62,5%.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp0,- atau setara dengan 0% dari total pagu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3.2.2

Sasaran Kegiatan 2

Tersedianya Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Tersedianya Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja.

IK 2. Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan (Produk)

Standar minimal mutu dan keamanan bahan pangan selalu berkembang mengikuti tuntutan konsumen. Perkembangan tersebut berkaitan erat dengan masalah gizi, manfaat bahan pangan, dan keamanan pangan bagi kesehatan manusia. Bahan pangan dengan kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan manusia dan memenuhi standar keamanan lebih diminati oleh konsumen. Keamanan pangan sangat tergantung pada pelaku industri dalam mengolah bahan pangan serta peran (kebijakan) pemerintah yang dapat memberi jaminan keamanan pada produk pangan. Salah satu peran pemerintah yang dapat memberi jaminan keamanan produk pangan adalah dengan standardisasi.

Standar Nasional Indonesia dirumuskan oleh Komite Teknis. Komite Teknis melaksanakan kaji ulang minimal 1 kali dalam lima tahun setelah SNI ditetapkan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka memelihara dan menilai kelayakan dan kekinian SNI. Hasil kaji ulang dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan amandemen, revisi, abolisi atau tetap tanpa perubahan terhadap SNI.

BBP3KP sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan bertugas melakukan penyiapan bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk dibahas dalam rapat teknis dan rapat konsensus bersama dengan Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan dan Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Non Pangan.

Berdasarkan Rapat Program Nasional Perumusan Standar yang dilakukan oleh Ditjen PDSPKP dan Komite Teknis, BBP3KP ditetapkan untuk melakukan penyusunan 4 bahan RSNI antara lain (1) Revisi SNI *Cephalopoda* beku; (2) Revisi SNI 7762:2013 Amplang Ikan; (3) SNI Ikan Hias *Flying Fox*; dan (4) SNI Ikan Hias Sepat Mutiara. BBP3KP juga melakukan kolaborasi dengan Kelompok Standarisasi dalam penyusunan Revisi SNI 7266: 2017 Bakso Ikan dan Revisi SNI 2721:2016 Ikan Asin Kering.

Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

1. Rapat persiapan penyusunan bahan RSNI Produk kelautan dan perikanan tahun 2023;
2. Identifikasi dan pengumpulan data terkait revisi SNI *Cephalopoda* Beku dengan mengunjungi 3 (tiga) perusahaan yang mengolah dan mengekspor komoditas cumi, sotong, dan gurita di Provinsi Jawa Timur. Perusahaan tersebut diantaranya PT. Dimas Reiza Perwira, PT. Alam Jaya, dan PT Agromina Wicaksana;

3. Identifikasi dan Pengumpulan data ikan hias Sepat Mutiara dan Flying Fox di Provinsi Sumatera Barat;
4. Rapat Pembahasan Bahan RSNI1 Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;
5. Identifikasi dan pengumpulan data penyiapan Bahan RSNI produk Amplang Ikan dengan mengunjungi 4 (empat) UMKM di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto. UMKM tersebut diantaranya UD. Sumber Rejeki dan UD. Dua Cahaya dari Kabupaten Sidoarjo dan UD. Mekar dan UD.Dewi Ikan dari Kabupaten Mojokerto.



Rapat persiapan penyusunan bahan RSNI Produk kelautan dan perikanan



Pengumpulan data RSNI *Cephalopoda* Beku di Provinsi Jawa Timur



Identifikasi dan Pengumpulan data ikan hias Sepat Mutiara dan *Flying Fox*

Gambar 4. Kegiatan BBP3KP dalam pencapaian target indikator kinerja Bahan RSNI hasil KP pada Triwulan I

Dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan data dukung berupa hasil uji laboratorium yang akan digunakan untuk menentukan syarat mutu dan keamanan pangan produk. Bagi permasalahan tersebut, tindak lanjut/rekomendasi yang dilakukan BBP3KP yaitu melakukan studi literatur dan koordinasi pengujian dengan Laboratorium daerah.

Tabel 4. Pencapaian Indikator Kinerja Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan (Produk)	3	3	0	0	0	3	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 3 rekomendasi kebijakan dan target jangka menengah tahun 2024 yakni 3 bahan RSNI.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp56.959.470,- atau setara dengan 18,99% dari total pagu sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

3.2.3

Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terselenggaranya Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja.

IK 3. Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)

Kegiatan Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan ditujukan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi hasil uji terap berupa ragam produk/alat/mesin/desain layout maupun pengujian dan sertifikasi produk kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi penyusunan media informasi sebagai bahan/peraga dan penyebaran informasi hasil uji terap dan pengujian hasil perikanan.

Penyusunan media informasi merupakan kegiatan pembuatan dan pencetakan media informasi. Bahan penyusunan media informasi tersebut merupakan hasil-hasil

inovasi/perekayasaan alat dan mesin, pengujian dan sertifikasi produk. Tujuan pembuatan media informasi adalah sebagai salah satu sarana untuk menyebarluaskan hasil inovasi/perekayasaan alat dan mesin, pengujian dan sertifikasi produk yang telah dilakukan oleh BBP3KP kepada masyarakat luas khususnya para pelaku usaha perikanan dengan harapan dapat diketahui, diadopsi dan diterapkan.



Gambar 5. Kegiatan diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan

Penyebarnya informasi hasil uji terap dan pengujian hasil perikanan terdiri dari kegiatan pameran, bazar, bimbingan teknis, webinar, demonstrasi teknologi pengolahan produk kelautan dan perikanan, merupakan upaya untuk memperkenalkan atau mempromosikan hasil-hasil inovasi/perekayasaan dan pengujian yang telah dilakukan oleh BBP3KP kepada masyarakat luas. Demonstrasi produk kelautan dan perikanan merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung/praktek tentang tata cara pembuatan produk hasil perikanan, yang dipandu oleh instruktur atau narasumber yang kompeten di bidangnya melalui kegiatan pameran, bazar, bimbingan teknis, webinar dengan target peserta/pengunjung. Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Penyebarnya Informasi Hasil Uji Terap dan Pengujian Hasil Perikanan pada Triwulan I

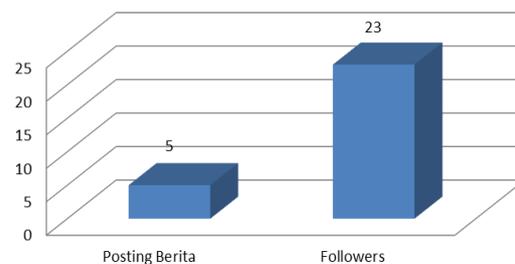
NO	PELAKSANAAN	KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA INFORMASI
1	25 Januari 2023	Penyebarnya Informasi pada Rangkaian Peringatan Hari Gizi Nasional ke- 63 di Silang Monas, Jakarta Pusat	0
2	24 Februari 2023	Penyebarnya Informasi pada Peringatan Hari Pers Nasional, Jurnalis Festival 2023 Taman Pemuda Pratama, Depok	70
3	06 Maret 2023	Penyebarnya Informasi pada UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo di GMB III KKP, Jakarta	40
4	03-04 Maret 2023	Penyebarnya Informasi pada Safari Gemarikan oleh HIMAFARI IPB di Ciampea, Kab. Bogor	45
5	14-15 Maret 2023	Penyebarnya Informasi pada Bimtek Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Dinas KP Kab. Tangerang	20

NO	PELAKSANAAN	KEGIATAN	JUMLAH PENERIMA INFORMASI
6	21 Maret 2023	Penyebarluasan Informasi pada Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan Kab. Bekasi	30
			205

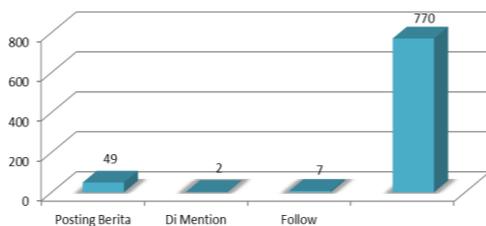
Website BBP3KP merupakan salah satu media penyebarluasan informasi yang dimiliki oleh BBP3KP guna untuk memberikan informasi terkait kegiatan-kegiatan internal ataupun eksternal yang melibatkan BBP3KP. Dalam rangka meningkatkan performa dari *website* tersebut, maka terus dilakukan upaya untuk peningkatan dari konten *website* itu sendiri. BBP3KP juga memanfaatkan sarana media sosial dalam proses penyebaran informasinya melalui akun Twitter (@bbp3kp), Facebook (Balbes dan Fan Page Bbp3kp Jakarta), Instagram (@bbp3kp), dan Youtube (BBP3KP Jakarta).

Content	Views	Watch time (hours)	Subscribers	Impressions	Impressions per Reach (%)			
Total	608	31.5	6	7,048	6.3%			
Cara Membuat Surti Ikan	170	28.2%	9.4	29.2%	2	33.3%	1,340	9.1%
Pengolahan Bandeng Cakuk Duri	155	25.0%	5.1	16.2%	1	16.7%	1,533	7.6%
Pengolahan Balok Ikan Tanggai	42	10.2%	2.5	8.1%	1	16.7%	951	9.7%
Laban Rumpuk Laut	27	4.4%	0.8	3.9%	0	0.0%	212	11.8%
Pengolahan Karang	17	2.8%	0.7	2.2%	0	0.0%	48	6.3%
Pengolahan Angka Lempeng Total	17	2.8%	0.9	3.0%	0	0.0%	249	4.4%
Quality Time BBP3KP #16 Audit Internal (M 000/001/1)	14	2.3%	7.8	26.6%	0	0.0%	103	9.7%
Reseed Stree dan Hamaan Biologiwalah	13	2.1%	0.2	0.9%	0	0.0%	94	13.1%
Pengolahan Bawal Rumpuk Laut	12	2.0%	0.5	1.7%	0	0.0%	123	6.5%
ALAI BESAR PENGELOMPOK PENERAPAN PRODUK KEL.	12	2.0%	0.4	1.4%	0	0.0%	140	7.1%
Kearifan Hibis Inovatif, Mandiri dan Berdaya Sang	11	1.8%	0.3	1.1%	0	0.0%	96	11.4%

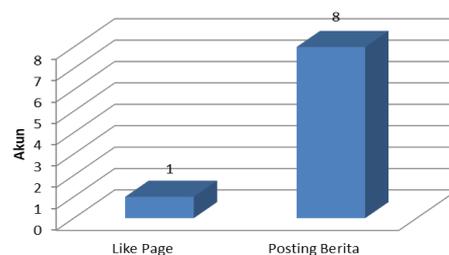
Rekapitulasi Instagram BBP3KP Periode Maret 2023



Rekapitulasi Twitter Periode Maret 2023



Rekapitulasi Facebook BBP3KP Maret 2023



Gambar 6. Rekapitulasi Pengunjung pada Sosial Media BBP3KP

Faktor yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini pada Triwulan I yaitu tingginya antusias peserta diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan, serta pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan secara intensif terkait penyelenggaraan event penyebarluasan informasi produk kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat kendala yang dihadapi yaitu belum terkumpulnya usulan judul dari sebagian Kelompok lingkup BBP3KP guna menyusun media informasi produk kelautan dan perikanan maupun sebagai konten di media sosial.

Bagi permasalahan tersebut, tindak lanjut/ rekomendasi yang dilakukan BBP3KP yaitu melakukan koordinasi dengan Kelompok lingkup BBP3KP untuk mengidentifikasi kebutuhan Kelompok tersebut dalam rangka mendukung kegiatan organisasi.

Tabel 6. Pencapaian Indikator Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)	1000	900	205	0	0	2039	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 205 orang. Capaian ini setara dengan 205% terhadap target triwulan I tahun 2023 yakni 100 orang atau 20,5% terhadap target tahun 2023 yakni 1.000 orang. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 2.039 orang dan target jangka menengah tahun 2024 yakni 900 orang.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp136.948.853,- atau setara dengan 13,69% dari total pagu sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3.2.4

Sasaran Kegiatan 4 Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Inkubasi Bisnis dan Pendampingan Teknologi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Inkubasi Bisnis dan Pendampingan Teknologi terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja.

IK 4. Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)

Fasilitasi inkubasi bisnis pengembangan usaha dilakukan oleh BBP3KP sebagai bentuk pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan. Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan atau yang disingkat Inbis Invapro-KP adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan

pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*). Kegiatan inkubasi bisnis ini didukung oleh Perpres No.27 Tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausaha, dan Peraturan Direktorat Jenderal PDSPKP No. 26 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Inkubator Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro-KP).

Pada tahun 2023, BBP3KP menargetkan 50 (lima puluh) UMKM pengolah produk pangan dan non pangan serta pemasar hasil perikanan yang mendapat fasilitasi dan pendampingan pengembangan usaha. Target 50 UMKM tersebut terdiri dari 21 (dua puluh satu) tenant baru tahun 2023 dan 29 (dua puluh sembilan) tenant tahun 2022 yang memasuki masa inkubasi tahun kedua. Pelaksanaan kegiatan Inbis Invapro-KP terdiri dari tahapan pra Inkubasi, Inkubasi dan pasca Inkubasi. Pada tahap Inkubasi dilaksanakan pendampingan dan fasilitasi kepada Tenant oleh Tim Inbis Invapro-KP BBP3KP dengan melibatkan tenaga ahli, Dinas Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan. Tahap inkubasi diatas berupa:

- 1) Bimbingan teknis pengembangan usaha
 - a. Workshop pembekalan program Inbis Invapro-KP
 - b. Bimbingan teknis diversifikasi produk
- 2) Pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha
 - a. Pendampingan pengembangan produk
 - b. Pendampingan penerapan jaminan mutu
 - c. Pendampingan manajemen usaha dan keuangan (*action plan, business model canvas*, pembukuan, dan analisa usaha)
 - d. Fasilitasi perizinan berusaha dan sertifikasi (NIB, P-IRT, SKP, HACCP, SNI, MD, Halal)
 - e. Fasilitasi pengembangan desain dan kemasan berupa pembiayaan desain, bahan dan label kemasan produk, dan pencantuman informasi nilai gizi
 - f. Fasilitasi promosi dan pemasaran
- 3) Monitoring dan Evaluasi

Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

- 1) Penyempurnaan pedoman teknis;
- 2) Terlaksananya proses seleksi calon tenant Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro-KP) BBP3KP tahun 2023 sesuai dengan surat Kepala BBP3KP Nomor: B.6055/BBP3KP/PDS.210/XII/2022 pada tanggal 28 Desember 2022 tentang Pemberitahuan Hasil Seleksi Tenant Inbis Invapro-KP

BBP3KP tahun 2023 bahwa ditetapkan 18 (delapan belas) UMKM, serta sesuai surat Kepala BBP3KP Nomor B.212/BBP3KP/PDS.210/II/2023 pada tanggal 09 Februari 2023 tentang Pemberitahuan Hasil Seleksi Tenant Inbis Ikan Hias tahun 2023 bahwa ditetapkan 3 (tiga) UMKM yang disajikan pada Tabel 7;

- 3) Persiapan kegiatan tenant Inbis Invapro-KP BBP3KP tahun 2023 yang dilaksanakan pada 12 Januari 2023 melalui zoom meeting antara tenant Inbis Invapro-KP tahun 2023 dengan tim Inbis Invapro-KP. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberi gambaran kepada tenant terkait rencana pelaksanaan kegiatan Inkubasi Bisnis selama tahun 2023;



Gambar 7. Rapat persiapan kegiatan pendampingan tenant Inbis Invapro KP

- 4) Pelaksanaan *workshop* pembekalan program inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan BBP3KP di Hotel Sultan Jakarta;
- 5) Pendampingan terhadap jaminan mutu dan keamanan serta pencantuman informasi nilai gizi produk tenant pada kemasan melalui fasilitasi pembiayaan dan pengujian produk tenant melalui pengajuan sampel pengujian tenant Inbis Invapro-KP kepada Laboratorium Balai Besar Industri Agro (BBIA);
- 6) Peningkatan manajemen usaha tenant dengan mengadakan pertemuan secara daring antara tenant dengan fasilitator, dengan tajuk “Kelas Manajemen Usaha” pada 07, 14 dan 21 Maret 2023.
- 7) Pendampingan UMKM Rendang Uniadek di Kabupaten Agam, UMKM DJN Cookies di Kabupaten Cirebon, UMKM Fritzy Food Bakery di Kabupaten Cimahi, UMKM 2 Koki di Kabupaten Mojokerto, dan Azzakhra Food di Kabupaten Bone.





Gambar 8. Pendampingan tenant Inkubasi Bisnis Invapro KP

Tabel 7. Hasil Seleksi Tenant Inbis Invapro-KP BBP3KP tahun 2023

No	Nama UMKM/Tenant	Nama Pemilik	Kota/Kabupaten
1	Saputra Snack	Nienik Rakhmawati Zauharoh	Kota Bontang, Kalimantan Timur
2	Pawon Koe	Diah Lestari	Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
3	PT. Rumah Kuliner Indonesia	Ropiandi Jamil	Kota Batam, Kepulauan Riau
4	UKM Azzakhra	Kamaruddin Kohar	Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
5	AHA Food	Aslinda	Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan
6	Bandeng Presto Bu Rita	Ratih Suci Wulandari	Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
7	Jutsuka	Rizki Awalfindy	Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan
8	PT Rizki Prima Food	Rizki Maulana	Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
9	DJN Cookies	Juwariyah Juwariyah	Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
10	Sarmila	Sri Narsih	Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
11	Mangathat	Elvina Rosa	Kabupaten Malang, Jawa Timur
12	Fritzy Food Bakery	Tetty Ariyani	Kota Cimahi, Jawa Barat
13	Rendang Uniadek	Sri Engla Deswita	Kabupaten Agam, Sumatera Barat
14	2 Koki	Slamet Khoirul Efendi	Kota Mojokerto, Jawa Timur
15	Dapur Way Kanan	Halimatussa'diyah	Kabupaten Way Kanan, Lampung
16	Alfitri	Eulis Sopianti	Kabupaten Garut, Jawa Barat
17	Olahan Ikan Nene Ahya	Rian Konangia	Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara
18	Pawon Pengsong	Nur Aida	Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
19	CV. Agrabanda	Zamzam Habib Munzin	Kabupaten Garut, Jawa Barat
20	Mina Muda Sejahtera	Muhammad Gema Ramadhan	Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
21	CV. Jojo Arwana Farm	Rusli Wisanto	Kota Denpasar, Bali

Dalam rangka penguatan lembaga Inkubator Bisnis Invapro-KP, tim Inbis Invapro-KP BBP3KP telah menerima sertifikat keanggotaan Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) dengan nomor anggota 31.03.149 yang berlaku hingga 31 Agustus 2026 pada tanggal 27 Januari 2023.



Gambar 9. Sertifikasi Keanggotaan AIBI

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu rancangan petunjuk teknis kegiatan Inkubasi Bisnis masih dalam tahap pembahasan dengan Biro Hukum untuk disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Tabel 8. Pencapaian Indikator Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)	50	26	0	0	0	24	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 24 UMKM dan target jangka menengah tahun 2024 yakni 26 UMKM.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp950.634.826,- atau setara dengan 27,16% dari total pagu sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

IK 5. Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (UMKM)

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan

perikanan kepada Pelaku Usaha bidang kelautan dan perikanan dalam mendorong nilai tambah produk kelautan dan perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan Pelaku Usaha dan masyarakat. Ruang lingkup pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran kepada koperasi dan pelaku usaha mikro kecil difokuskan pada isu strategis dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pelaku usaha mikro kecil dan koperasi yang mendapatkan pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran antara lain dilakukan melalui (a) perbaikan dalam proses produksi, (b) perbaikan mutu produk, (c) diversifikasi produk bernilai tambah, (d) pengadopsian teknologi, (e) uji penerimaan dan perluasan pasar, dan (f) uji preferensi konsumen. Indikator keberhasilan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran meliputi (a) terpenuhinya perbaikan dalam proses produksi, (b) meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, (c) terpenuhinya mutu produk sesuai persyaratan, dan (d) meningkatnya keberterimaan pasar.

Kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran dilaksanakan melalui tahapan berikut:

- a. Persiapan pelaksanaan kegiatan
 - Pembentukan tim pelaksana kegiatan
 - Pengumpulan data dan informasi
- b. Penentuan teknik pengolahan dan pemasaran
 - Identifikasi dan penyusunan daftar usulan
 - Penentuan teknik pengolahan dan pemasaran
- c. Penetapan pelaku usaha
 - Penyusunan daftar pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan
 - Penentuan terhadap calon pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
 - Penetapan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan
- d. Penetapan jenis fasilitasi pendampingan
- e. Pelaksanaan pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran
- f. Monitoring pendampingan, evaluasi pendampingan dan pelaporan

Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

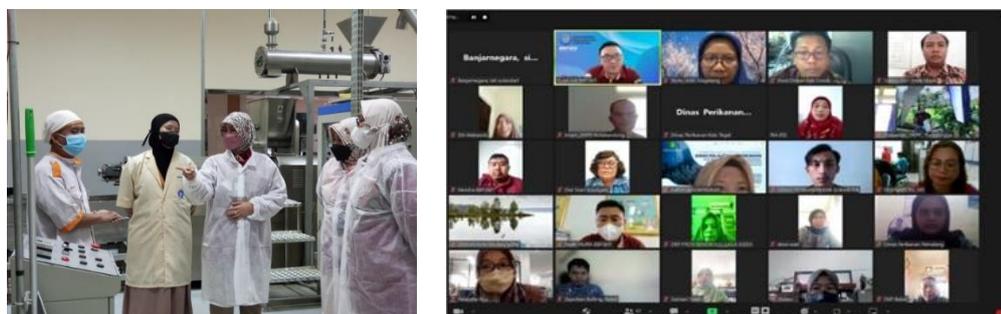
- a. Penyusunan dokumen petunjuk teknis (Juknis) Fasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran dengan Biro Hukum KKP;
- b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM)

- i. Bimbingan teknis dalam rangka berpartisipasi pada kegiatan mobil ATI pada Hari Pers Nasional (HPN). Jurnalis Indonesia Peduli (JIP) menyelenggarakan Jurnalis Fest 2023. BBP3KP memeriahkan kegiatan dengan memperkenalkan produk olahan berbasis ikan dan rumput laut, produk klien LSPro-HP dan produk tenant Inbis Invapro KP, serta dilakukan demonstrasi pengolahan eggroll udang dan fish cone tuna.
- ii. Kegiatan *training of trainer* (TOT) fasilitasi pedampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dengan tema Kebijakan Standar Kelayakan Dasar Pengolahan UPI Mikro Kecil dan Menengah serta Penerapan Standar Kelayakan Dasar Pengolahan UPI Mikro dan Kecil. Narasumber pada kegiatan ini yaitu Pak Santoso selaku *Plant Manager* CV. SAKANA INDO PRIMA dan Pak Wahyu Andre selaku Subkoordinator Standarisasi Produk Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, PDSPKP, KKP.



Gambar 10. Peningkatan kompetensi SDM

- c. Audiensi/ kunjungan terkait produk olahan berbahan baku rumput laut di PT. FITS Mandiri, Bogor;
- d. Koordinasi awal fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dengan UMKM dan perwakilan Dinas KP secara daring;



Gambar 11. Kunjungan PT. FITS Mandiri dan Koordinasi awal dengan UMKM dan perwakilan Dinas KP

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga permasalahan yang dihadapi yaitu belum tersusunnya petunjuk teknis pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran kepada pelaku usaha khususnya koperasi dan usaha mikro dan kecil

bidang kelautan dan perikanan. Tindak lanjut dari permasalahan tersebut ialah melakukan percepatan penyelesaian petunjuk teknis serta melakukan koordinasi dengan Biro Hukum KKP. Tindak lanjut atas permasalahan telah diselesaikan pada Triwulan I. Petunjuk teknis yang telah disusun tersebut sudah diajukan dan menunggu disahkan oleh Menteri KP.

Tabel 9. Pencapaian Indikator Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (UMKM)	40	0	0	0	0	0	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023 dan belum tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maupun target jangka menengah tahun 2024.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp190.626.933,- atau setara dengan 15,89% dari total pagu sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

3.2.5

Sasaran Kegiatan 5

Terlaksananya Layanan Sertifikasi dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Terlaksananya Layanan Sertifikasi dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja.

IK 6. Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)

Standardisasi memiliki peran yang strategis dalam peningkatan daya saing suatu produk. Umumnya standar dimanfaatkan konsumen sebagai acuan dalam memilih produk.

Bagi produsen, standar berfungsi sebagai patokan dalam memproduksi produk yang berkualitas dan dapat diterima pasar nasional maupun internasional. Masyarakat secara umum menghendaki bahwa seluruh produk perikanan yang beredar di pasar merupakan barang yang aman dan tidak membahayakan kesehatan.

Pemberlakuan SNI secara wajib telah ditetapkan untuk dua produk hasil perikanan, yaitu SNI Sarden dan Makrel dalam kemasan kaleng dan SNI Tuna dalam kemasan kaleng. Pemberlakuan SNI secara wajib tersebut memerlukan Lembaga Sertifikasi Produk sebagai lembaga penilaian kesesuaian untuk memastikan dan memberikan sertifikat bahwa produk telah sesuai dengan SNI. Ditjen PDSPKP melalui BBP3KP sebagai LSPro-HP memiliki peran yang penting dalam melakukan sertifikasi terhadap produk sarden dan makarel dalam kemasan kaleng dan tuna dalam kemasan kaleng.

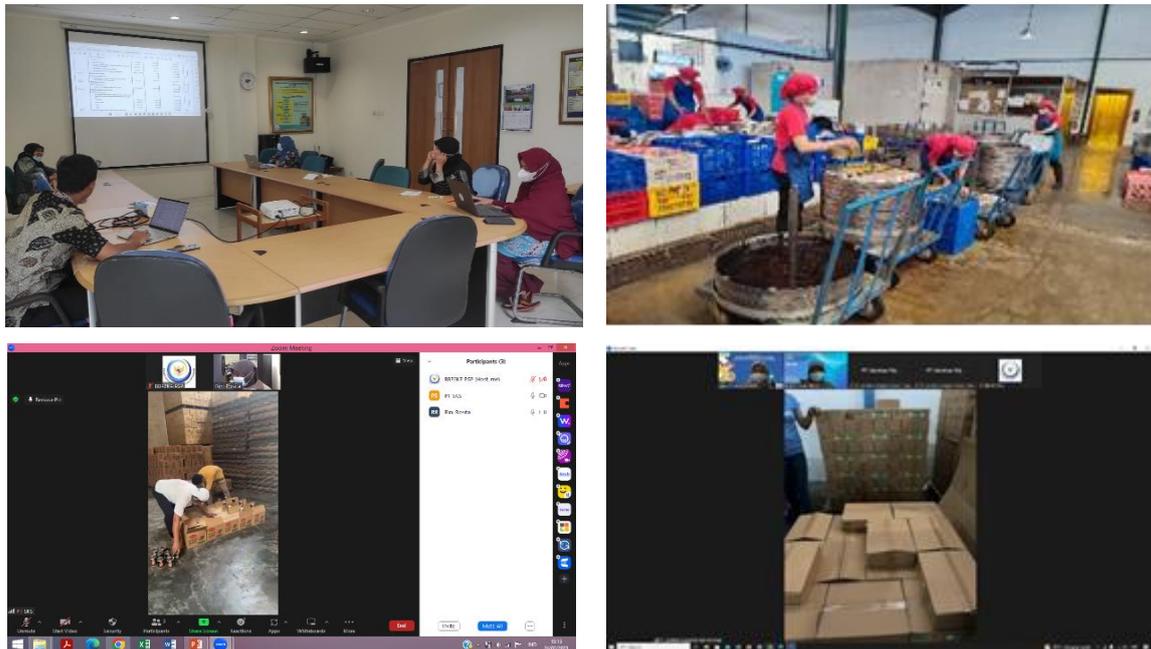
Pemberian tanda SNI pada suatu produk dapat dilakukan apabila produk tersebut diproduksi oleh suatu unit pengolahan yang telah mendapat Sertifikat Kesesuaian, Sertifikat Kelayakan Pengolah, melakukan produksi secara kontinu, dan proses produksi serta produknya memenuhi persyaratan sesuai SNI. Penerbitan Sertifikat Kesesuaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). LSPro-HP merupakan lembaga sertifikasi yang berada di BBP3KP yang bergerak pada sertifikasi produk pengolahan hasil perikanan. LSPro-HP ini sudah terakreditasi KAN. LSPro-HP BBP3KP juga ditunjuk sebagai LSPro yang menerbitkan SPPT SNI untuk produk tuna, sarden dan makrel dalam kemasan kaleng yang diberlakukan secara Wajib.

Proses sertifikasi produk terdiri dari pengajuan sertifikasi, evaluasi sesuai skema (pemeriksaan proses produksi dan pengambilan contoh, pengujian contoh, tindakan perbaikan), tinjauan hasil evaluasi, keputusan sertifikasi dan penerbitan sertifikat. Selama masa berlaku sertifikat (4 tahun), LSPro-HP melakukan surveilan untuk memastikan bahwa proses produksi dan produk klien sertifikasi tetap sesuai dengan persyaratan SNI. Sistem manajemen lembaga sertifikasi produk (SNI ISO/IEC 17065) yang diterapkan harus dipelihara supaya selalu sesuai dengan persyaratan standarnya masing-masing. Pemeliharaan sistem ini dilakukan melalui antara lain audit internal, kaji ulang dokumen, kaji ulang manajemen dan rapat *governing board*.

Sasaran produk yang disertifikasi didasarkan pada ruang lingkup sertifikasi LSPro-HP yang telah diakreditasi oleh KAN per tanggal 6 Desember 2021 yaitu meliputi produk (1) baso ikan beku, (2) kerupuk ikan, (3) ikan asin kering, (4) bandeng presto, (5) bandeng cabut duri, (6) abon ikan, (7) sarden dan makarel dalam kemasan kaleng, (8) tuna dalam

kemasan kaleng, (9) naget ikan, (10) otak-otak ikan, (11) pempek ikan rebus beku, (12) siomay ikan, (13) amplang ikan, (14) ikan pindang, (15) surimi, (16) bandeng isi, (17) ikan renyah, (18) fillet patin beku, (19) udang beku, (20) kerupuk ikan/udang/moluska siap makan. Selain layanan penilaian kesesuaian produk kelautan dan perikanan, BBP3KP juga melakukan pemeliharaan sistem manajemen mutu LSPPro-HP sesuai SNI ISO/IEC 17065.

Pada tahun 2023, BBP3KP menargetkan 1 Layanan. Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain: (1) rapat pembahasan sertifikasi, (2) surveilan terhadap produk naget ikan (UKM Mina Food), abon ikan (UKM Khansa Snack & Food), tuna dalam kemasan kaleng (PT Sinar Pure Foods International), makerel dalam kemasan kaleng (PT Koin Bumi), tuna dalam kemasan kaleng (PT Koin Bumi), makerel dalam kemasan kaleng (PT Sumber Karya Sejati), bandeng duri lunak (PT Bandeng Juwana), tuna dalam kemasan kaleng (PT Carvinna Trijaya Makmur), makerel dalam kemasan kaleng (PT Carvinna Trijaya Makmur), (3) evaluasi penambahan ruang lingkup terhadap produk sarden dalam kemasan kaleng merek ABC (PT Heinz ABC Indonesia), tuna dalam kemasan kaleng merek SMS (PT Samudera Mandiri Sentosa).



Gambar 12. Kegiatan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan

Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada Lampiran 2. Sebaran lokasi UPI Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan pada Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Peta Sebaran Lokasi Penilaian Kesesuaian Produk Kelautan dan Perikanan terhadap SNI

Pemeliharaan sistem manajemen mutu LSPro-HP sesuai SNI ISO/IEC 17065, pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan BBP3KP antara lain yaitu (1) rapat koordinasi dalam rangka pembahasan kegiatan pemeliharaan Sistem Manajemen SNI ISO 17065:2012 Tahun 2023 tanggal 27 Januari 2022, (2) forum *group discussion* tentang Pedoman KAN dan Regulasi Lembaga Sertifikasi Produk tanggal 19 Januari 2023, (3) pertemuan teknis pelayanan publik LSPro-HP BBP3KP dalam rangka menyampaikan informasi mutakhir terkait dengan layanan publik penerbitan Sertifikat Kesesuaian dan penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) tanggal 27 Februari - 01 Maret 2023, dan (4) rapat kerja teknis peningkatan kapasitas pelaksana sertifikasi produk dan laboratorium pengujian tanggal 08 - 10 Maret 2023.

Dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi adalah aplikasi sertifikasi online yang dibuat oleh Pusdatin KKP tidak dapat digunakan kembali. Bagi permasalahan tersebut, tindak lanjut/rekomendasi yang dilakukan oleh BBP3KP adalah membuat aplikasi sertifikasi online yang baru.

Tabel 10. Pencapaian Indikator Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1	0	0	0	0	0	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Tahun 2022, nomenklatur indikator kinerja terkait sertifikasi yaitu Produk Kelautan dan Perikanan yang

Dinilai Kesesuaiannya terhadap SNI dengan target 80 produk, sehingga nantinya capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator kinerja tersebut juga tidak dapat dibandingkan dengan Renstra. Nomenklatur terkait sertifikasi pada Renstra yaitu Jumlah Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan dengan target pada tahun 2023 sebesar 90 produk.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp146.091.718,- atau setara dengan 15,92% dari total pagu sebesar Rp917.850.000,- (sembilan ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

IK 7. Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)

Produk perikanan secara umum perlu diuji nutrisi dan mutunya karena produk tersebut telah mengalami proses pengolahan dan pencampuran dengan bahan-bahan non ikan, seperti tepung dan bumbu-bumbu yang digunakan dalam proses pembuatannya. Dari sudut pandang konsumen, ketersediaan data nutrisi dan mutu memberi kesempatan bagi mereka untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sisi lain, dari sudut pandang produsen, ketersediaan data nutrisi dan mutu produk diharapkan dapat meningkatkan daya saing dari produk tersebut.

Uji nutrisi dan mutu produk hasil perikanan telah dilaksanakan oleh BBP3KP sejak tahun 2010. Pada tahun 2023, kegiatan ini meliputi pengujian contoh produk klien LS Pro-HP untuk proses sertifikasi, contoh produk perikanan sebagai data dukung penyusunan RSNI, contoh produk dari tenant binaan inkubasi bisnis, tenant binaan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, contoh produk eksternal dan contoh produk dari UPI/pasar/pelabuhan yang disampling oleh personil laboratorium yang ditugaskan. Selain itu pada tahun 2023, BBP3KP juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu dan Persyaratan Teknis Laboratorium Pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025.

Ketersediaan data uji diharapkan dapat membantu pelaku usaha pengolahan dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. Selain itu, hasil pengujian nutrisi dan mutu juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan Ditjen PDSPKP, misalnya dalam upaya percepatan penurunan stunting (anak kerdil) melalui revitalisasi ketahanan pangan dan gizi.

Pada tahun 2023, BBP3KP menargetkan 1 Layanan. Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas yaitu telah dilakukan pengujian terhadap 142 produk dengan total data yang telah dihasilkan sebanyak 719 data uji. Data jenis produk yang telah diuji disajikan pada Lampiran 3. Pemeliharaan sistem manajemen mutu dan persyaratan teknis laboratorium pengujian sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 juga telah dilakukan BBP3KP pada Triwulan I antara lain (1) penyediaan bahan acuan proksimat dengan matriks *fish paste* kode T25212QC dan bahan acuan serat pangan kode T2497QC dengan matriks *wheat flour*, (2) pendaftaran uji profisiensi parameter proksimat (air, abu, lemak total dan nitrogen) untuk mantriks pasta ikan, (3) pemeliharaan panelis standar, dan (4) verifikasi metode.



Gambar 14. Kegiatan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan

Dalam pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi adalah sarana prasarana laboratorium mengalami kerusakan seperti atap bocor dan AC mati. Bagi permasalahan tersebut, tindak lanjut/rekomendasi yang dilakukan oleh BBP3KP adalah melakukan perbaikan dan peremajaan gedung serta *maintenance* AC.

Tabel 11. Pencapaian Indikator Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1	0	0	0	0	0	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Tahun 2022, nomenklatur indikator kinerja terkait pengujian yaitu Produk Kelautan dan Perikanan yang Diuji dengan target 360 produk, sehingga nantinya capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator kinerja tersebut juga tidak dapat

dibandingkan dengan Renstra. Nomenklatur terkait pengujian pada Renstra yaitu Jumlah Data Hasil Pengujian Nutrisi dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dengan target pada tahun 2023 sebesar 1.300 data uji.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp123.166.950,- atau setara dengan 10,26% dari total pagu sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

3.2.6

Sasaran Kegiatan 6 Nilai PNBPN Sektor KP di lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Nilai PNBPN Sektor KP di lingkungan Ditjen PDSPKP terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja.

IK 8. Nilai PNBPN di lingkungan BBP3KP (Rp Miliar)

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SubSektor Kelautan dan Perikanan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/ruang lingkup PNBPN antara lain: pelayanan, pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan hak negara lainnya. Dasar hukum PNBPN yaitu: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN, PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBPN, dan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Nilai PNBPN di lingkungan BBP3KP tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,585 M. Berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN, capaian indikator kinerja ini yang bersumber dari BBP3KP telah mencapai Rp208.940.500,-. Nilai tersebut setara dengan 35,71% terhadap target tahun 2023.

Nilai tersebut diperoleh dari penerimaan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya yaitu sebesar Rp63.010.000,- dan dari penggunaan sarana dan prasarana oleh stakeholder, yaitu pemanfaatan ruangan, sewa ruang pameran, kolam, akuarium, bak *fiber glass* sebesar Rp145.930.500,-.

Tabel 12. Pencapaian Indikator Nilai PNBP di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		2022-2023
Nilai PNBP di lingkungan BBP3KP (Rp Miliar)	0,585	0	0	0	0	0,82	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu Rp0,82M. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target jangka menengah tahun 2024.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, belum terdapat realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, dengan alokasi pagu sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

3.2.7

Sasaran Kegiatan 7

Tenaga Kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan Tenaga Kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja.

IK 9. Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa di bidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.

Tenaga kerja yang terlibat merupakan jumlah tenaga kerja yang menerima manfaat dari kegiatan Inkubasi Bisnis di BBP3KP dan tenaga kerja yang menerima manfaat dari kegiatan pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan.

Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah mempersiapkan rencana penghitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan inkubasi bisnis dan pendampingan teknik

pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan di BBP3KP. Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak terdapat permasalahan yang dihadapi.

Tabel 13. Pencapaian Indikator Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	450	0	0	0	0	3.684	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 3.684 orang. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target jangka menengah tahun 2024.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, belum terdapat realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, dengan alokasi pagu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

3.2.8

Sasaran Kegiatan 8 Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan BBP3KP

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan

- Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan BBP3KP terdiri atas 11 (sebelas) indikator kinerja.

IK 10. Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP (Nilai)

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

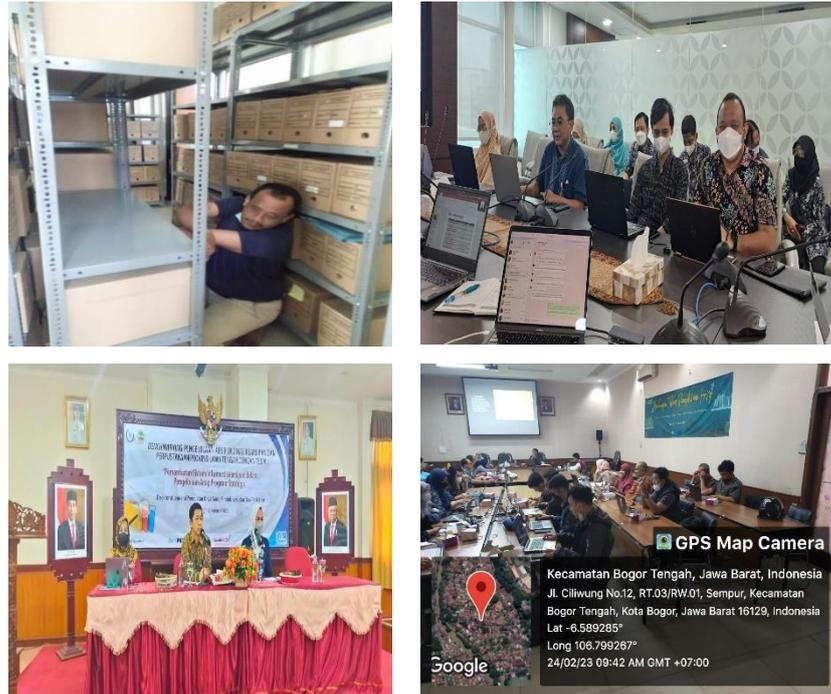
Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

1. Mengikuti kegiatan Pengelolaan Penomoran Elayar Tahun 2023 secara virtual zoom pada 02 Januari 2023,
2. Mengikuti kegiatan Sosialisasi Permen KP Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas secara virtual zoom pada 13 Januari 2023,
3. Mengikuti kegiatan *benchmarking* pengelolaan arsip dengan tema "Pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Dalam Pengelolaan Arsip Program Strategis" di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah pada 31 Januari-03 Februari 2023,
4. Mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, Bogor pada 23-24 Februari 2023,
5. Melaksanakan kegiatan pemilahan arsip inaktif di Record Center BBP3KP, dan
6. Mengikuti kegiatan pembahasan penggunaan Fitur Baru pada Menu Aplikasi Perkantoran E-Layar di GMB KKP pada 24 Maret 2023.



Gambar 15. Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan Arsip

Tabel 14. Pencapaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Nilai Pengawasan Kearsipan di lingkungan BBP3KP (Nilai)	75	0	0	0	0	94,74	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 94,74. Indikator kinerja ini belum tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target jangka menengah tahun 2024.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp13.993.000,- atau setara dengan 10,87% dari total pagu sebesar Rp128.787.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

IK 11. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)

WBK (Wilayah Bebas Korupsi) adalah sebutan atau predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 . Unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK akan ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan.

Penilaian Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi yang ada pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK dituangkan dalam Keputusan Menteri.

Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai menuju WBK adalah:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- c. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
- d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Pada Tahun 2019, BBP3KP memperoleh predikat menuju WBK oleh tim penilai internal KKP. Untuk mempertahankan nilai tersebut diperlukan konsistensi dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP (TPI) dan KemenPAN-RB (TPN). Pada Tahun 2021, BBP3KP juga telah memenuhi syarat WBK dengan nilai 82,21 yang terdiri dari komponen pengungkit sebesar 44,55 dan komponen hasil sebesar 37,66. Dalam komponen pengungkit terdapat 4 area yang memenuhi syarat WBK dan 2 area yang memenuhi syarat WBK/WBBM, yaitu area penataan sistem manajemen SDM Aparatur dan area penguatan akuntabilitas. Namun BBP3KP masih belum lolos penilaian TPN. Pada tahun 2022, BBP3KP tidak dilakukan penilaian TPI.

Pada Tahun 2023, Tim Pelaksana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BBP3KP yang dibentuk berdasarkan Surat Penugasan Tim Nomor

B.34/BBP3KP/KP.440/I/2023 telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya pemenuhan kriteria penilaian Pembangunan Zona Integritas dengan melibatkan seluruh pegawai BBP3KP. Dalam memperkuat pengawasan, BBP3KP juga membentuk tim penanganan pengaduan, tim unit penanganan gratifikasi, dan tim penanganan benturan kepentingan.

Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BBP3KP setiap bulan;
- b. Melakukan *morning briefing* RB lingkup Ditjen PDSPKP pada hari Senin minggu pertama dan lingkup BBP3KP dilaksanakan hari Senin minggu kedua; dan
- c. Dilakukan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Inspektorat IV, dengan nilai 84,32 yang terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 47,78 (Nilai Pemenuhan 24,27 dan Nilai Reform 23,51) dan nilai Komponen Hasil sebesar 36,54.



Gambar 16. Kegiatan persiapan dan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM

Tabel 15. Pencapaian Indikator Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	75	0	0	0	0	84,57	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 84,57. Indikator kinerja terkait WBK yang tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 memiliki nomenklatur Unit Kerja yang Berpredikat menuju WBK dengan target 4 Unit Kerja, sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan target jangka menengah tahun 2024.

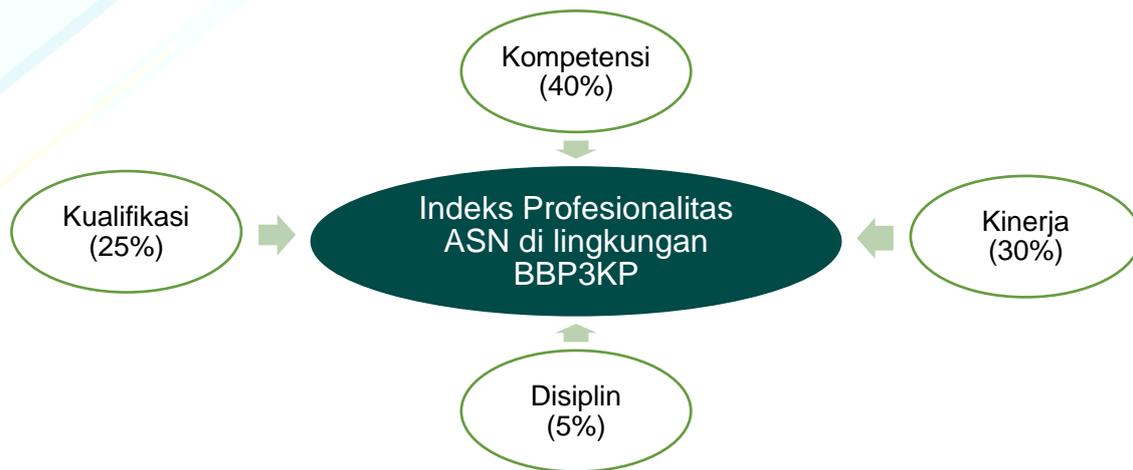
Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp24.273.100,- atau setara dengan 16,32% dari total pagu sebesar Rp148.765.000,- (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

IK 12. Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Penilaian dimensi kualifikasi menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/ workshop/ magang/ kursus.

Dimensi kinerja menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP). Informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS ditunjukkan melalui dimensi disiplin. Bobot komponen penilaian IP ASN dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Komponen Indeks Profesionalitas ASN BBP3KP

Pengolahan data diambil dari database kepegawaian SIMPEG Online KKP. Pada tahun 2023, indikator kinerja di atas diukur dengan periode semesteran, berdasarkan pemantauan pada aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id/>.

Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas antara lain:

1. Mengikuti bimbingan teknis penilaian kinerja pada Aplikasi e-Kinerja BKN pada 09 Januari 2023;
2. Melaksanakan kegiatan pembahasan usulan peserta diklat kepemimpinan, penerimaan penghargaan dan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pada 20 Januari 2023;
3. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan pegawai lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023 – 2026 pada 30 Januari 2023;
4. Mengikuti kegiatan sosialisasi teknis pengisian struktur organisasi, analisis jabatan, dan analisis beban kerja melalui aplikasi SI-ASN pada 03 Februari 2023;
5. Mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman penilaian kinerja pegawai melalui aplikasi e-Kinerja BKN dengan peserta seluruh pegawai BBP3KP pada 06 Februari 2023;
6. Melaksanakan pelatihan, webinar dan e-learning bagi pegawai BBP3KP;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kehadiran jam kerja, pengajuan cuti dan penilaian SKP; dan
8. Melakukan pengisian SKP tiap bulan dengan tepat waktu dan monev tiap bulan.



Gambar 18. Kegiatan peningkatan profesionalitas ASN BBP3KP

Tabel 16. Pencapaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)	82,9	76	0	0	0	82,92	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, Indikator Kinerja di atas diukur dengan periode semesteran sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada Triwulan berikutnya. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 82,92 dan target jangka menengah tahun 2024 yakni 76.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp40.156.089,- atau setara dengan 11,45% dari total pagu sebesar Rp350.738.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

IK 13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP (Nilai)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja

baik perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Nilai PM SAKIP BBP3KP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BBP3KP merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Unit Eselon I.

Pada Triwulan I, kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas diantaranya:

- a. Mengesahkan Surat Penugasan Tim Nomor B.44/BBP3KP/KP.440/I/2023 tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di BBP3KP dengan tanggal pengesahan 02 Januari 2023.
- b. Telah disusunnya dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKK, Rincian Target IKK, Rencana Aksi atas PK lingkup BBP3KP tahun 2023. Dokumen-dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang akan mempengaruhi penilaian pada aspek perencanaan kinerja pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP.
- c. Kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan secara berkala triwulanan.
- d. Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan secara tepat waktu yakni paling lambat 21 hari setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi.



Gambar 19. Kegiatan dialog kinerja organisasi dan penyusunan dokumen PK

Tabel 17. Pencapaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		2022-2023
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP (Nilai)	80,5	84,75	0	0	0	0	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 yakni 84,75.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp9.061.500,- atau setara dengan 6,23% dari total pagu sebesar Rp145.500.000,- (seratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

IK 14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP (%)

Penyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada LK BBP3KP tahun 2022}}{\text{Jumlah realisasi anggaran BBP3KP tahun 2022}} \times 100$$

Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah dengan melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban Triwulan I Tahun 2023 untuk meminimalisir adanya temuan. Dalam pelaksanaan kegiatan, tidak terdapat permasalahan yang ditemui.

Tabel 18. Pencapaian Indikator Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP (%)	≤0,5	0	0	0	0	75%	0

Pada Triwulan I 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Tahun 2022, nomenklatur indikator kinerja terkait temuan LHP BPK-RI yaitu Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BBP3KP dengan target 75%, sehingga nantinya capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 karena tidak tercantum di dalamnya.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp2.638.000,- atau setara dengan 10,75% dari total pagu sebesar Rp24.550.000,- (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

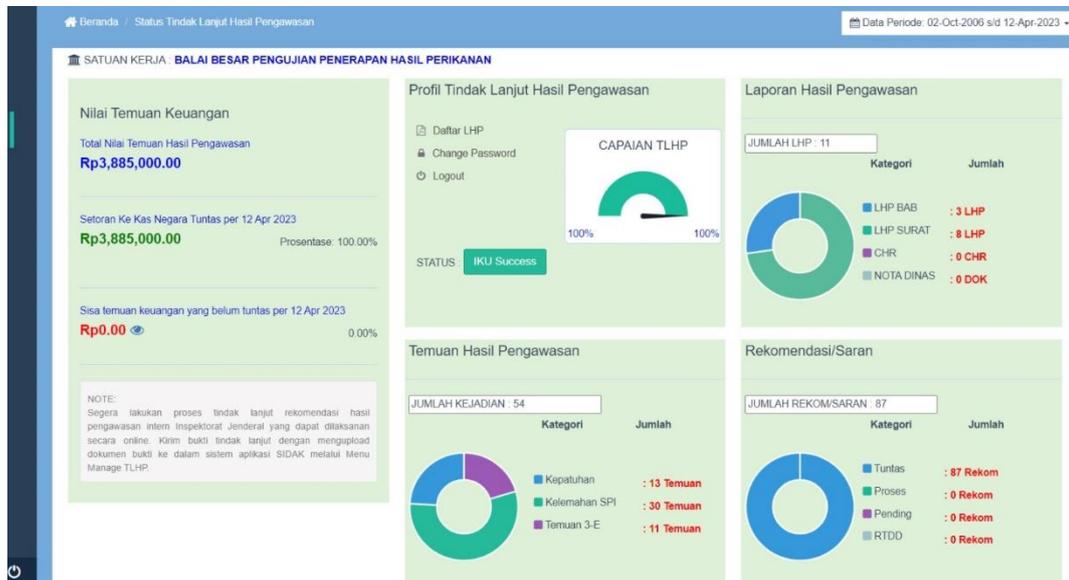
IK 15. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP (%)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BBP3KP merupakan persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BBP3KP (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2021 s.d 31 September 2022 atau Triwulan IV Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit kerja BBP3KP.

Sejak akhir tahun 2019, pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP dengan periode triwulanan melalui aplikasi Sidak KKP. Penghitungan indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BBP3KP}} \times 100$$

Kegiatan pendukung dalam upaya mencapai indikator kinerja ini adalah segera menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi yang diberikan Itjen. Tangkapan layar aplikasi SIDAK pada Triwulan I disajikan pada Gambar 20.



Gambar 20. Tangkapan Layar Aplikasi SIDAK Triwulan I Tahun 2023

Pada Triwulan I Tahun 2023, berdasarkan aplikasi Sidak KKP capaian tindak lanjut hasil pengawasan BBP3KP mencapai 100%. Dari 11 LHP terdapat 54 temuan dengan 87 rekomendasi. Dari 87 rekomendasi tersebut telah dinyatakan tuntas.

Tabel 19. Pencapaian Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP (%)	75	80	100	133,33	125	100	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP adalah 100%. Capaian ini setara dengan 133,33% terhadap target tahun 2023 yakni 75 atau 125% terhadap target jangka menengah tahun 2024 yakni 80.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp0,- atau setara dengan 0% dari total pagu sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

IK 16. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP (Inovasi)

Berdasarkan **Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021**, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

KRITERIA INOVASI

1. Memiliki Kebaruan
2. Efektif
3. Bermanfaat
4. Dapat Ditransfer/Direplikasi
5. Berkelanjutan

KELOMPOK INOVASI

1. Kelompok Umum
2. Kelompok Khusus

Terdapat dua aspek penilaian indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP yaitu aspek penilaian kelompok umum dan aspek penilaian kelompok khusus. Aspek penilaian kelompok umum terdiri atas: (a) ringkasan (5%); (b) ide inovatif (20%); (c) signifikansi (25%); (d) kontribusi terhadap capaian TPB (5%); (e) adaptabilitas (20%); (f) keberlanjutan (20%); dan (g) kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus terdiri atas: (a) pembaruan / peningkatan Inovasi (25%); (b) adaptabilitas (20%); (c) penguatan keberlanjutan (25%) dan (d) evaluasi (30%). Formula pengukuran indikator kinerja ini yaitu Eselon II yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I, dengan target hasil yaitu proposal inovasi unit kerja level II yang ditetapkan dalam Berita Acara penilaian oleh Tim Penilaian Eselon I.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, BBP3KP berencana untuk melakukan inovasi terkait penerapan *QR-code* dan *barcode* dalam sertifikat kesesuaian

dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang diterbitkan BBP3KP. Pada Triwulan I, upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja di atas yaitu menindaklanjuti hal tersebut melalui koordinasi dengan Pusdatin sebagai pengembang aplikasi lingkup KKP pada tanggal 20 Februari 2023.



Gambar 21. Koordinasi Penerapan QR-code dan Barcode pada layanan Sertifikat Kesesuaian dan SPPT SNI dengan Pusdatin

Tabel 20. Pencapaian Indikator Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP (Inovasi)	1	1	0	0	0	0	0

Pada Triwulan I Tahun 2023, indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2023 dan belum tercantum dalam Renstra BBP3KP Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maupun target jangka menengah tahun 2024.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp130.048.000,- atau setara dengan 62,78% dari total pagu sebesar Rp207.150.000,- (dua ratus tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

IK 17. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap

perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, dan pagu minus);
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran (data kontrak, pengelolaan UP/TUP, LPJ bendahara, dan dispensasi SPM);
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran (penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output, dan retur SP2D); dan
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA (kesalahan SPM, dan perencanaan kas).

Pada Tahun 2023 terdapat reformulasi IKPA sebagai berikut :



Gambar 22. Reformulasi IKPA 2023

Pada Triwulan I, kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target indikator kinerja di atas adalah dengan optimalisasi SPI BBP3KP. Diharapkan dengan SPI yang optimal seluruh komponen yang menjadi bobot penilaian IKPA dapat dioptimalkan pencapaiannya. Selain itu juga dilakukan penginputan capaian output pada Aplikasi SAKTI secara tepat waktu.

Langkah-langkah yang akan ditempuh guna meningkatkan capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran BBP3KP, antara lain:

- a. Pada aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran:
 - melakukan revisi DIPA secara selektif dengan perbaikan kualitas perencanaan anggaran;
 - memastikan pelaksanaan anggaran berjalan baik dengan cara menyusun dan menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan anggaran;
 - melaksanakan reviu atas DIPA dan rencana kegiatan;
 - mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus sesegera mungkin.
- b. Pada aspek kepatuhan atas regulasi:
 - meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data supplier dan data kontrak. Data kontrak disampaikan ke KPPN tepat waktu (paling lambat 5 hari kerja sejak kontrak ditandatangani/tanggal kontrak);
 - meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP/TUP;
 - meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian LPJ bendahara. (upload ke aplikasi SPRINT sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya);
 - meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu penyampaian SPM terutama pada akhir tahun anggaran untuk menghindari adanya dispensasi SPM.
- c. Pada aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan:
 - meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM dan daftar rekening tujuan untuk menghindari retur SP2D;
 - mengeksekusi anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan;
 - memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Belanja Pegawai. SPM LS Kontraktual disampaikan ke KPPN paling lambat 17 hari kerja sejak serah terima/penyelesaian pekerjaan).
- d. Pada aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan:
 - meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran;
 - meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian oleh KPPN.

Tabel 21. Pencapaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target		Realisasi TW I Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%) 2022-2023
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	89	90	0	0	0	94,90	0

Pada Triwulan I 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini dapat dibandingkan capaiannya pada akhir tahun, dengan capaian tahun 2022 yaitu 94,90 dan terhadap target jangka menengah tahun 2024 yaitu 90.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp30.823.777,- atau setara dengan 13,49% dari total pagu sebesar Rp228.460.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

IK 18. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Aplikasi SMART DJA Kemenkeu telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART DJA Kemenkeu yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART DJA Kemenkeu juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang

mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, penghitungan NKA menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NKA = (P \times WP) + (K \times Wk) + (PK \times WPK) + (E \times WE)$$

Keterangan:

NKA	:	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PDSPKP
P	:	Nilai kinerja aspek implementasi dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker
WP	:	Bobot penyerapan anggaran sebesar 9,7%
K	:	Nilai kinerja aspek implementasi dilakukan dengan membandingkan antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan
WK	:	Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 18,2%
PK	:	Nilai kinerja aspek implementasi dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran
WPK	:	Bobot pencapaian keluaran sebesar 43,5%
E	:	Nilai kinerja aspek implementasi dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran
WE	:	Bobot efisiensi sebesar 28,6%

Kegiatan yang dilakukan BBP3KP pada Triwulan I dalam upaya mendukung capaian Indikator Kinerja di atas yaitu penginputan capaian output melalui aplikasi SAKTI yang saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi SMART Kemenkeu oleh petugas yang ditetapkan, serta terus melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian output yang telah diinput.

Tabel 22. Pencapaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		2022-2023
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	86	89	0	0	0	86,21	0

Pada Triwulan I 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan capaiannya pada akhir tahun, dengan capaian tahun 2022 yaitu 86,21 dan terhadap target jangka menengah tahun 2024 yaitu 89.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp33.445.300,- atau setara dengan 22,30% dari total pagu sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

IK 19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP (%)

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BBP3KP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BBP3KP terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja Unit Eselon I dalam kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

1. Aspek Market (40%)
2. Aspek Demand (60%)

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa dihitung dari jumlah nilai Aspek Market dan Aspek Demand. Penilaian IKU Level Eselon II dan/atau Unit Pengendali Teknis (UPT) dilakukan melalui Penilaian Mandiri masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan data dukung.

Kegiatan yang telah dilakukan BBP3KP dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja di atas yaitu telah melakukan penyusunan spesifikasi dan dokumen pengadaan, melakukan identifikasi barang/ material yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pelaksanaan proses pemilihan penyedia dan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk 11 unit AC.

Tabel 23. Pencapaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		2022-2023
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP (%)	77,5	0	0	0	0	0	0

Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BBP3KP merupakan indikator kinerja baru yang ditargetkan sebesar 77,5%. Indikator kinerja ini bersifat tahunan. Pengukuran indikator kinerja ini akan dilakukan penilaian mandiri masing-masing unit kerja dan hasil penilaiannya akan didapatkan setelah berakhirnya tahun anggaran 2023.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp178.900.000,- atau setara dengan 17,04% dari total pagu sebesar Rp1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah).

IK 20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BBP3KP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BBP3KP terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup BBP3KP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).

Kegiatan yang telah dilakukan oleh BBP3KP dalam rangka pencapaian target tahun 2023 yaitu pembahasan draft perjanjian penggunaan sarana prasarana raiser ikan

hias di Cibinong, identifikasi penggunaan akun belanja barang milik negara, penyiapan dokumen usulan perubahan RKBMN tahun 2023 dan reuiu usulan perubahan RKBMN tahun 2023 dan pembahasan capaian hasil reuiu usulan revisi RKBMN.



Gambar 23. Kegiatan BMN Triwulan I Tahun 2023

Tabel 24. Pencapaian Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)

Indikator Kinerja	Target		Realisasi Tahun 2023	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		Realisasi Tahun 2022	Persentase Pertumbuhan Realisasi (%)
	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2023	Tahun 2024		2022-2023
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)	77,5	0	0	0	0	91,5	0

Pada Triwulan I 2023, Indikator kinerja di atas diukur dengan periode tahunan sehingga pencapaiannya baru dapat dilihat pada akhir tahun. Capaian indikator kinerja ini nantinya dapat dibandingkan capaiannya pada akhir tahun, dengan capaian tahun 2022 yaitu 91,5. Indikator kerja ini merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp18.035.260,- atau setara dengan 16,40% dari total pagu sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.3.1. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2023

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BBP3KP pada Triwulan I Tahun 2023 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BBP3KP Nomor: DIPA-032.06.2.427686/2022 tanggal 30 November 2022 dengan pagu yaitu

Rp35.970.109.000,- (tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang semuanya merupakan rupiah murni.

Realisasi Anggaran BBP3KP per Rincian Output Kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 25. Realisasi Anggaran BBP3KP per Output Kegiatan

Kegiatan	Output	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi	
5279. Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	5279.ADA.001 Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	300.000.000	56.959.470	243.040.530	18,99	
	5279. AEF.001 Orang yang Menerima Diseminasi Diversifikasi Produk KP	1.000.000.000	136.948.853	863.051.147	13,39	
	5279.BAH.001 Layanan Sertifikasi Produk	1.125.000.000	276.139.718	848.860.282	24,55	
	BAH.002 Layanan Pengujian Produk	1.200.000.000	123.166.950	1.076.833.050	10,26	
	5279.QDG.001 UMKM yang Difasilitasi dalam Inkubator Bisnis	3.500.000.000	950.634.826	2.549.365.174	27,16	
	5279. QDG.002 UMKM yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil KP	1.200.000.000	190.626.933	1.009.373.067	15,89	
	2361.CAN.051 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Ditjen PDSPKP yang disediakan	150.000.000	-	150.000.000	-	
	2361.EBA.962 Layanan Umum	600.000.000	69.800.189	530.199.811	11,63	
	2361.EBA.994 Layanan Perkantoran	25.295.109.000	3.690.922.240	21.604.186.760	14,59	
	2361.EBB.951 Layanan Sarana Internal	900.000.000	-	900.000.000	-	
	2361. EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	150.000.000	33.445.300	116.554.700	22,30	
	2361.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	150.000.000	9.061.500	140.938.500	6,04	
	2361.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	400.000.000	60.119.037	339.880.963	15,03	
	JUMLAH		35.970.109.000	5.597.825.016	30.372.283.984	15,56

Pada Triwulan I Tahun 2023, penyerapan anggaran BBP3KP adalah Rp5.597.825.016,- (lima miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam belas rupiah) atau setara dengan 15,56% terhadap total pagu anggaran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja periode Triwulan I Tahun 2023, beberapa indikator kinerja yang memiliki target Triwulanan telah mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja BBP3KP, telah dilakukan koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai target indikator kinerja.

Secara umum, indikator kinerja BBP3KP yang dapat dihitung pada triwulan I tahun 2023 telah tercapai $\geq 100\%$. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 120%.

4.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Melakukan monitoring pencapaian kinerja terhadap target yang telah direncanakan;
2. Melakukan penyusunan media informasi sesuai dengan kebutuhan organisasi;
3. Mengumpulkan hasil uji laboratorium yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan RSNi dalam menentukan syarat mutu dan keamanan pangan suatu produk.

Sementara itu, rekomendasi pada Laporan Kinerja Tahun 2022 telah ditindak lanjuti sebagai berikut:

1. Rekomendasi: Masih diperlukan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya percepatan kegiatan/verifikasi ke klien pada tahun 2023. telah ditindak lanjuti, terdapat perubahan satuan indikator kinerja kegiatan sertifikasi produk, yang sebelumnya memiliki target 80 produk menjadi 1 layanan.

2. Rekomendasi: Melakukan pemantauan ke dalam aplikasi SIMPEG terkait IP ASN dan mengingatkan kepada setiap pegawai untuk melakukan pengisian. telah ditindak lanjuti dengan memaksimalkan komponen nilai IP ASN yaitu kompetensi, disiplin dan kinerja. Namun untuk komponen kualifikasi diperlukan adanya kemauan dan kesempatan bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja BBP3KP Triwulan I Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuk pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang

Lampiran 1.
Salinan revisi PK Level 2
BBP3KP Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN BERSERKA TIMUR NOMOR 10
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130, KP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMARAN: 021-3519033

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Trisna Ningsih**
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Pti. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2023

Pihak Kedua
Pti. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Trisna Ningsih

12	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan BBP3KP (Indeks)	82,9
13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan BBP3KP (Nilai)	80,5
14	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan BBP3KP (%)	40,5
15	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimantapkan untuk Perbaikan Kinerja di lingkungan BBP3KP (%)	75
16	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada BBP3KP (Inovasi)	1
17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	89
18	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) di lingkungan BBP3KP (Nilai)	88
19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BBP3KP (%)	77,5
20	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di lingkungan BBP3KP (%)	77,5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
KEGIATAN 1. PENGUJIAN PENERAPAN HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Inovatif dan Berdaya Saing	1 Persentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Inovatif dan Berdaya Saing (%)	67,5
2	Tersedianya Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP	2 Bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP yang Disediakan (Produk)	3
3	Tersenggaranya Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan	3 Peserta Diseminasi Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan (Orang)	1000
4	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Inkubasi Bisnis dan Pendampingan Teknologi	4 Pelaku Usaha yang Dibina dalam Inkubator Bisnis (UMKM)	50
		5 Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (UMKM)	40
5	Terlaksananya Layanan Sertifikasi dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan	6 Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1
		7 Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan (Layanan)	1
6	Nilai PNPB Sektor KP di lingkungan BBP3KP	8 Nilai PNPB di lingkungan BBP3KP (Rp Miliar)	0,585
7	Tenaga Kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	9 Tenaga Kerja yang terlibat bidang Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	450
KEGIATAN 2. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP			
DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN			
8	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan BBP3KP	10 Nilai Pengawasan Kelembagaan di lingkungan BBP3KP (Nilai)	75
		11 Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BBP3KP (Nilai)	75

DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.325.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	27.645.109.000
Total Anggaran Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2023		35.970.109.000

Jakarta, 31 Januari 2023

Pihak Kedua
Pti. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Trisna Ningsih

Lampiran 2
 Layanan Sertifikasi SNI Produk
 Kelautan dan Perikanan yang
 Dilaksanakan

Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan

No	Nama Produk	Lokasi	Merek	Nama Klien
TW 1				
1	Sarden dan makarel dalam kemasan kaleng	Jakarta	dongwon	PT. Koin Bumi
2	Tuna dalam kemasan kaleng	Jakarta	dongwon	PT. Koin Bumi
3	Tuna dalam kemasan kaleng	Bitung, Sumatera Utara	FRABELLE PANTAI MANADO SINAR	PT. Sinar Pure Food Internasional
4	Sarden dan makarel dalam kemasan kaleng	Batam, Kepulauan Riau	Po Sung	PT. Sumber Karya Sejati
5	Abon ikan	Yogyakarta	Khansa	UKM Khansa Snack & Food
6	Naget ikan	Rembang, Jawa Tengah	Ayasea	UKM Mina Food
7	Tuna dalam kemasan kaleng	Bitung, Sumatera Utara	SMS	PT. Samudera Mandiri Sentosa
8	Sarden dalam kemasan kaleng	Jakarta	ABC	PT. Heinz ABC Indonesia
9	Sarden dan makarel dalam kemasan kaleng	Bitung, Sumatera Utara	TKS	PT. Carvinna Trijaya Makmur
10	Tuna dalam kemasan kaleng	Bitung, Sumatera Utara	Carvinna TKS	PT. Carvinna Trijaya Makmur
11	Pempek	Bekasi, Jawa Barat	Sauja	UKM Dapur Sauja
12	Pempek	Batam, Kepulauan Riau	Mang jai 788	UKM Mang Jai
13	Abon ikan	Purbalingga, Jawa Tengah	Marisa	Poklahsar Prima Melati
14	Bandeng duri lunak	Semarang, Jawa Tengah	Bandeng Juwana	PT. Bandeng Juwana

Lampiran 3
Layanan Pengujian Produk
Kelautan dan Perikanan yang
Dilaksanakan

Layanan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan yang Dilaksanakan

No.	Asal Contoh	No.	Produk	Parameter Uji	Data
1.	PT Interfood Sukses Jasindo	1.	Makerel dalam saos tomat Naraya 425 g	Merkuri (Hg)	3
		2.	Sarden dalam saos tomat Naraya 425 g	Timbal (Pb)	3
		3.	Makerel dalam saos cabe MY CHEF 425g	Kadmium (Cd)	3
				Arsen (As)	3
				Timah Putih (Sn)	3
				Histamin	3
				Filth	3
				Bobot Tuntas	3
		Sensori	3		
2.	UKM Mang Jai 788	4.	Pempek rebus	Merkuri (Hg)	2
		5.	Pempek goreng	Timbal (Pb)	2
		6.	Pempek panggang	Kadmium (Cd)	2
		7.	Otak otak	Arsen (As)	2
		8.	Otak otak LP	Timah Putih (Sn)	2
		9.	Pempek rebus LP	Kadar air	4
		10.	Pempek rebus	Kadar abu	1
		11.	Pempek rebus	Kadar Lemak	1
		12.	Pempek rebus	Kadar protein	4
		13.	Pempek rebus	Histamin	1
				ALT	8
				<i>E. coli</i>	2
				<i>Salmonella</i>	1
				<i>V. cholerae</i>	1
		<i>S. aureus</i>	8		
		Filth	2		
		Sensori	2		
3.	PT. Srijaya Raya Perkasa	14.	Sarden saus tomat 155 Mili	Histamin	2
		15.	Makarel saus tomat 425 g Mili	Timbal (Pb)	2
				Kadmium (Cd)	2
				Merkuri (Hg)	2
				Arsen (As)	2
				Timah Putih (Sn)	2
				Filth	2
				Bobot Tuntas	2
		Parasit	1		
		Sensori	2		
4.	CV Sakana Indo Prima	16.	Bakso Ikan	Merkuri (Hg)	1
		17.	Ikan	Timbal (Pb)	1
		18.	Bakso Ikan	Kadmium (Cd)	1
		19.	Bakso Ikan	Arsen (As)	1
		20.	Bakso Ikan	Timah Putih (Sn)	1
		21.	Bakso Ikan	Kadar air	1
				Kadar abu	1
				Kadar protein	1
				Histamin	2
				ALT	5
				<i>E. coli</i>	5
		<i>Salmonella</i>	5		
		<i>S. aureus</i>	5		

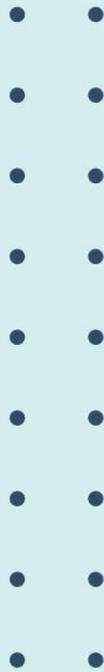
No.	Asal Contoh	No.	Produk	Parameter Uji	Data
				<i>V. cholerae</i>	5
				<i>V. Parahaemolyticus</i>	5
				Filth	1
				Sensori	1
5.	Monika Rasa	22.	Siomay	Kadar air	5
		23.	Bakso ikan	Kadar abu	5
		24.	Empuk empuk	Kadar protein	5
		25.	Keong mas	Kadar Lemak	5
		26.	Tahu ikan	Natrium	5
6.	Ranafra	27.	Siomay ikan	Kadar air	5
		28.	Naget ikan	Kadar abu	5
		29.	Dimsum ikan bentuk Gyoza	Kadar protein	5
		30.	Bakso ikan asap	Kadar Lemak	5
		31.	Olahan ikan bentuk keong	Natrium	5
				Merkuri (Hg)	1
				Timbal (Pb)	1
				Kadmium (Cd)	1
				ALT	1
				<i>S. aureus</i>	1
				Filth	1
				Sensori	1
7.	UTTPP	32.	Gurita utuh (Flower IQF) PT. Miktra Timur Rayatama	Timbal (Pb)	4
		33.	Gurita (Cut Tentacle) PT. Agrita Best Seafood	Kadmium (Cd)	4
		34.	Cumi cumi beku PT. SIF	Merkuri (Hg)	4
		35.	Sotong beku PT. SIF	Arsen (As)	4
				ALT	4
				<i>E. coli</i>	4
				<i>Salmonella</i>	4
				<i>V. Parahaemolyticus</i>	4
8.	UKM BDS Snack	36.	Amplang ikan	Merkuri (Hg)	1
				Timbal (Pb)	1
				Kadmium (Cd)	1
				Arsen (As)	1
				Timah Putih (Sn)	1
				Kadar air	1
				Kadar abu	1
				Kadar lemak	1
				Kadar protein	1
				ALT	1
				<i>E. coli</i>	1
				<i>Salmonella</i>	1
				<i>S. aureus</i>	1
				<i>V. cholerae</i>	1
				Sensori	1
9.	PT Citraraja Ampat Canning	37.	Ikan tuna dalam minyak 180g DEHO	Histamin	1
				Timbal (Pb)	1
				Kadmium (Cd)	1
				Merkuri (Hg)	1
				Arsen (As)	1
				Timah Putih (Sn)	1
				Filth	1
				Bobot Tuntas	1
				Sensori	1

No.	Asal Contoh	No.	Produk	Parameter Uji	Data
10.	UKM Barokah Pak Suratmin	38.	Amplang ikan	Merkuri (Hg)	1
				Timbal (Pb)	1
				Kadmium (Cd)	1
				Arsen (As)	1
				Timah Putih (Sn)	1
				Kadar air	1
				Kadar abu	1
				Kadar lemak	1
				Kadar protein	1
				ALT	1
				<i>E. coli</i>	1
				<i>Salmonella</i>	1
				<i>S. aureus</i>	1
				<i>V. cholerae</i>	1
		Sensori	1		
11.	Abon Jaya Mandiri	39.	Abon Ikan Tuna	Merkuri (Hg)	1
		40.	Abon Ikan Tuna	Timbal (Pb)	1
		41.	Abon Ikan Tuna	Kadmium (Cd)	1
		42.	Abon Ikan Tuna	Kadar air	1
		43.	Abon Ikan Tuna	Kadar protein	1
		44.	Abon Ikan Tuna	Filth	1
				Sensori	1
				ALT	5
				<i>E. coli</i>	5
				<i>Salmonella</i>	5
				<i>S. aureus</i>	5
12.	Berkah Samudera Nusantara (Iwakula)	45.	Bakso ikan	Kadar air	1
		46.	Bakso ikan	Kadar abu	1
		47.	Bakso ikan	Kadar protein	1
		48.	Bakso ikan	Kadar Lemak	1
		49.	Bakso ikan	Karbohidrat	1
		50.	Bakso ikan	Natrium	1
				<i>Salmonella</i>	5
		51.	Tekwan	<i>S. aureus</i>	5
		52.	Tekwan		
		53.	Tekwan		
		54.	Tekwan		
55.	Tekwan				
13.	PT Sriraya Jaya Perkasa	56.	Makerel dalam saos tomat LSC 425 g	Histamin	3
		57.	Makerel dalam saos tomat Curhat 425 g	Timbal (Pb)	3
		58.	Makerel dalam saos tomat Starway 425g	Kadmium (Cd)	3
				Merkuri (Hg)	3
				Arsen (As)	3
				Timah Putih (Sn)	3
				Filth	3
				Bobot Tuntas	3
		Sensori	3		
14.	CV Global Pangan Sedulur	59.	Bandeng isi	Merkuri (Hg)	1
		60.	Bandeng isi	Timbal (Pb)	1
		61.	Bandeng isi	Kadmium (Cd)	1
		62.	Bandeng isi	Arsen (As)	1
		63.	Bandeng isi	Kadar abu	1

No.	Asal Contoh	No.	Produk	Parameter Uji	Data
		64.	Bandeng isi	Kadar protein	1
				Filth	1
				Sensori	1
				ALT	5
				<i>S. aureus</i>	5
15.	UTTPP	65.	Gelas Rumput Laut	Kadar air	3
		66.	Gelas Rumput Laut	Kapang/khamir	3
		67.	Gelas Rumput Laut		
16.	PT Chipsey Ludmila Indonesia	68.	Siomay	Kadar protein	1
				Kadar Lemak	1
17.	BDS Snack	69.	Amplang ikan	Kadar lemak	1
				Kadar protein	1
				ALT	1
18.	PT Heinz ABC	70	Sarden dalam saus tomat 425 PT IJP	Histamin	5
		71	Sarden saus tomat 155 PT IJP	Timbal (Pb)	5
		72	Sarden saus cabai 425 PT IJP	Kadmium (Cd)	5
		73	Sarden saus cabai 155 PT IJP	Merkuri (Hg)	5
		74	Sarden saus tomat 425 PT SLJ	Arsen (As)	5
		75	Sarden saus tomat 155 PT SLJ	Timah Putih (Sn)	5
		76	Sarden saus cabai 425 PT SLJ	Filth	10
		77	Sarden saus cabai 155 PT SLJ	Bobot Tuntas	10
		78	Sarden extra pedas 155 PT SLJ	Sensori	10
		79	Sarden extra pedas 425 PT SLJ		
19.	MaRiSa	80	Abon lele original flavour MaRiSa Pengurangan gula 10%	Kadar protein	3
		81	Abon lele original flavour MaRiSa Pengurangan gula 25%		
		82	Abon lele original flavour MaRiSa Pengurangan gula 5%		
20.	UD Family Food	83	Bakso Ikan Best Go	Merkuri (Hg)	2
		84	Bakso Ikan Best Go	Timbal (Pb)	2
		85	Bakso Ikan Best Go	Kadmium (Cd)	2
		86	Bakso Ikan Best Go	Arsen (As)	2
		87	Bakso Ikan Best Go	Timah Putih (Sn)	2
		88	Bakso Ikan Laras Food	Kadar air	2
		89	Bakso Ikan Laras Food	Kadar abu	2
		90	Bakso Ikan Laras Food	Kadar protein	2
		91	Bakso Ikan Laras Food	Histamin	2
		92	Bakso Ikan Laras Food	ALT	10
				<i>E. coli</i>	10
				<i>Salmonella</i>	10
				<i>S. aureus</i>	10
				<i>V. cholerae</i>	10
				<i>V. Parahaemolyticus</i>	10
				Filth	1
				Sensori	1
		93	Naget Ikan Best Go	Merkuri (Hg)	4
		94	Otak-otak Ikan Best Go	Timbal (Pb)	4
		95	Naget Ikan Best Go	Kadmium (Cd)	4
		96	Otak-otak Ikan Best Go	Arsen (As)	4
				Timah Putih (Sn)	4
				Kadar air	4
				Kadar abu	4
				Kadar protein	4
				Kadar Lemak	4
				ALT	4
				<i>E. coli</i>	4
				<i>Salmonella</i>	4

No.	Asal Contoh	No.	Produk	Parameter Uji	Data
				<i>V. cholerae</i>	4
				<i>S. aureus</i>	4
				Filth	4
				Sensori	4
		97	Siomay ikan Best Go	Histamin	2
		98	Siomay ikan Best Go	Merkuri (Hg)	2
		99	Siomay ikan Best Go	Timbal (Pb)	2
		100	Siomay ikan Best Go	Kadmium (Cd)	2
		101	Siomay ikan Best Go	Kadar air	2
		102	Siomay ikan Best Go	Kadar abu	2
		103	Siomay ikan Laras Food	Kadar protein	2
		104	Siomay ikan Laras Food	Kadar Lemak	2
		105	Siomay ikan Laras Food	Filth	2
		106	Siomay ikan Laras Food	Sensori	2
		107	Siomay ikan Laras Food	ALT	10
		108	Siomay ikan Laras Food	<i>S. aureus</i>	10
21	PPU BBP3KP – Segara Biru	109	Fish Seaweed Crackers	Kadar Air	15
	PPU BBP3KP – Mina Akbar Nusantara-Trenggalek	110	Gongso Tuna	Kadar Abu	15
	PPU BBP3KP – Fatih Kuliner - Tulang Bawang Barat	111	Seluang Baby Crispy	Kadar Lemak	15
	PPU BBP3KP – Terminal Camilan Pak Min	112	Abon ikan	Kadar protein	15
		113	Stik Ikan Tulang	Karbohidrat	15
	PPU BBP3KP – Wadimah Kab. Bandung	114	Abon ikan lembaran	Na	15
		115	Egg roll		
	PPU BBP3KP – Karya Mina – Banjarnegara	116	Abon ikan		
		117	Pastel ikan		
	PPU BBP3KP – Navar Bahari Raya	118	Dimsum tuna		
	PPU BBP3KP – Jaya- Belitung	119	Pilus rumput laut		
	PPU BBP3KP – Bolubollo	120	Bandeng Presto Duri Lunak		
	PPU BBP3KP – Tekad Snack	121	Keripik bawang rasa udang		
	PPU BBP3KP – Bale Bahari	122	Bakso ikan		
		123	Sate ikan		
22	Dapur Sauja	124	Pempek ikan rebus	ALT	5
		125	Pempek ikan rebus		
		126	Pempek ikan rebus		
		127	Pempek ikan rebus		
		128	Pempek ikan rebus		
23	PT. Indo Seafood	129	Ikan kuniran (<i>Nemipterus marginatus</i>)	Histamin	1
		130	Surimi Itoyori	Timbal (Pb)	2
				Kadmium (Cd)	2
24	POKLAHSAR Prima Melati	131	Abon Ikan lele	ALT	5
		132	Abon Ikan lele		
		133	Abon Ikan lele		
		134	Abon Ikan lele		
		135	Abon Ikan lele		
		136	Abon Ikan lele	Kadar Lemak	1
25		137	Teri (Firman)	Formalin	1

No.	Asal Contoh	No.	Produk	Parameter Uji	Data
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor	138	Udang Vanamae (Firman)		1
		139	Udang sungai (Adi)		1
		140	Pisang pisang (Adi)		1
		141	Cumi cumi (Khoir)		1
		142	Teri nasi (Khoir)		1
Total Produk		142	Total data uji		719



BBP3KP

 Jl. Raya Setu No. 70, Kel. Setu, Kec Cipayung ,
Jakarta Timur, 13880

 021-84997969/ 84998429 Fax: 021-84999360

 kcp.go.id/djpdspkp/bbp2hp

 [bbp3kp](#)

 [bbp3kp](#)

 [BBP3KP JAKARTA](#)

